

2023

RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BONE

PEMERINTAH KABUPATEN BONE



RENCANA KERJA TAHUN 2023

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BONE**



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 37 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 yang terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta memberi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, maka diperlukan Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1926);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 41);
19. Peraturan Bupati Bone Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 107);

20. Peraturan Bupati Bone Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan wilayah pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilhan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk priode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk priode 5 (lima) tahun.

10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama 1 (satu) tahun, dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, dan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan maksud:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023; dan
- c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

BAB III SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan;
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
Bab V : Penutup.

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:

Lampiran I	: Dinas Pendidikan
Lampiran II	: Dinas Kesehatan
Lampiran III	: BLUD RSUD Tenriawaru
Lampiran IV	: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Lampiran V	: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
Lampiran VI	: Satuan Polisi Pamong Praja
Lampiran VII	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Lampiran VIII	: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Lampiran IX	: Dinas Sosial
Lampiran X	: Dinas Ketenagakerjaan
Lampiran XI	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lampiran XII	: Dinas Ketahanan Pangan
Lampiran XIII	: Dinas Lingkungan Hidup
Lampiran XIV	: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Lampiran XV	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Lampiran XVI	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Lampiran XVII	: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Lampiran XVIII	: Dinas Perhubungan
Lampiran XIX	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Lampiran XX	: Dinas Koperasi
Lampiran XXI	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
Lampiran XXII	: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Lampiran XXIII	: Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran XXIV	: Dinas Kebudayaan
Lampiran XXV	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lampiran XXVI	: Dinas Pariwisata
Lampiran XXVII	: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Lampiran XXVIII	: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Lampiran XXIX	: Dinas Perindustrian
Lampiran XXX	: Dinas Perdagangan
Lampiran XXXI	: Dinas Perikanan
Lampiran XXXII	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampiran XXXIII	: Badan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran XXXIV	: Badan Pendapatan Daerah
Lampiran XXXV	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lampiran XXXVI	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Lampiran XXXVII	: Inspektorat Daerah
Lampiran XXXVIII	: Sekretariat DPRD

Lampiran XXXIX	: Sekretariat Daerah
Lampiran XL	: Kecamatan Lamuru
Lampiran XLI	: Kecamatan Dua Boccoe
Lampiran XLII	: Kecamatan Sibulue
Lampiran XLIII	: Kecamatan Barebbo
Lampiran XLIV	: Kecamatan Cina
Lampiran XLV	: Kecamatan Mare
Lampiran XLVI	: Kecamatan Awangpone
Lampiran XLVII	: Kecamatan Tellu Siattinge
Lampiran XLVIII	: Kecamatan Cenrana
Lampiran XLIX	: Kecamatan Ajangale
Lampiran L	: Kecamatan Amali
Lampiran LI	: Kecamatan Palakka
Lampiran LII	: Kecamatan Ulaweng
Lampiran LIII	: Kecamatan Bengo
Lampiran LIV	: Kecamatan Tellu Limpo
Lampiran LV	: Kecamatan Lappariaja
Lampiran LVI	: Kecamatan Patimpeng
Lampiran LVII	: Kecamatan Ponre
Lampiran LVIII	: Kecamatan Libureng
Lampiran LIX	: Kecamatan Bontocani
Lampiran LX	: Kecamatan Kahu
Lampiran LXI	: Kecamatan Kajuara
Lampiran LXII	: Kecamatan Tonra
Lampiran LXIII	: Kecamatan Salomekko
Lampiran LXIV	: Kecamatan Tanete Riattang
Lampiran LXV	: Kecamatan Tanete Riattang Barat
Lampiran LXVI	: Kecamatan Tanete Riattang Timur

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023, Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai rujukan penyusunan program dan kegiatan.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6

Bappeda menelaah kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan RKPD Tahun 2023.

Pasal 7

Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
PENUTUP**

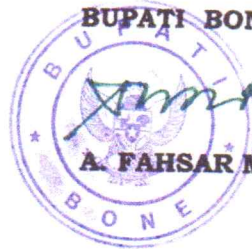
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 25 Juli 2022

BUPATI BONE,



A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 25 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,



ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 39

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada tuhan yang maha kuasa, karena pada tahun 2022 ini Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Bone telah selesai menyusun Rencana Kerja Tahun 2023.

Rencana Kerja ini akan digunakan sebagai pedoman dan arahan pengelolaan Keuangan yang hendak dicapai pada priode 2018 - 2023, renstra merupakan pedoman dalam penyusunan: (1) rencana kerja(renja); (2) rencana kerja dan anggaran (RKA);(3) laporan tahunan; dan (4) laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah(LAKIP); (5) rencana/program Pengelolaan Keuangan daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bone.


Dalam rencana strategis (renstra) perubahan tahun 2018 -2023 ini terdapat tujuan dan sasaran Badan Keuangan Dan Aset Daerah yang mengacu kepada tujuan dan sasaran yang ada di dalam RPJMD Kabupaten Bone yaitu *Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel dan berkesinambungan dengan Sasaran Meningkatkan Kualitas Layananan dan Akuntabilitas Kinerja Dalam Pemerintahan Daerah dan Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang bersih , Transparan , Efektif, dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi.*

Kami sadar bahwa didalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ini masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran demi perbaikan Pengelolaan Keuangan di Kabupaten Bone sehingga visi Kabupaten Bone adalah Masyarakat Kabupaten Bone yang MABESSA (Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera).

Dan akhirnya, semoga semua program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun kedepan dapat lebih terarah, berdaya guna, dan berhasil guna.

Watampone, 25 Juli 2022

Kepala BKAD Kabuapten Bone



H. NAJAMUDDIN, S.Sos, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19631007 198611 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1. 1. Latar Belakang 1

1. 2. Landasan Hukum 3

1. 3. Maksud dan Tujuan 4

1. 4. Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKAD 14

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone.. 34

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 30

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 45

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 39

3. 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 39

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 44

3.3 Program dan Kegiatan..... 53

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 51

BAB V PENUTUP 60

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna perlu disusun perencanaan pembangunan daerah, meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program OPD, lintas OPD, program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.

Dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan menjabarkan rencana detail teknis pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rencana Strategis yang memuat tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja OPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik

yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Renja OPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang mempunyai kedudukan dan fungsi strategis dalam sistem perencanaan daerah karena Renja OPD merupakan perencanaan pada unit organisasi terendah yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka anggaran guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang keuangan daerah.

Renja OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Dalam menyusun Renja OPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya mensinergikan pencapaian sasaran dan target Renstra OPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan. Renja OPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja dapat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)- OPD.

1. 2. Landasan Hukum

Bahwa penyusunan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone mengacu pada:

1. Undang- Undang Nomor 29 tahun 1959 tetang pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 1822)
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Tenrang Perubaha kedua atas Undang- Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor5679)
6. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perauran Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 6398);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012 -2032 (Lembaran daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2)
10. Peraturan daerah kabupaten Bone Nomor 9 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005- 2025 (Lembaran daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 nomor 1)
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 9);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023
 14. Peraturan Bupati Bone Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 107);
 15. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 nomor 41);
 16. Peraturan Bupati Bone Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Bone Tahun 2023 (Berita Daerah kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone adalah merupakan dokumen tahunan yang merupakan penjabaran Rencana Strategis Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2018-2023 dan untuk mewujudkan sinergis antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, dengan OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bone.

Dalam mencapai maksud diatas, tujuan penyusunan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone, meliputi:

- a. Mengevaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra
- b. Mengidentifikasi kinerja pelayanan BKAD.
- c. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis BKAD 1 (satu) tahun mendatang.
- d. Menetapkan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja dan target pembangunan BKAD selama 1 (satu) tahun mendatang.
- e. Menetapkan rencana program dan kegiatan pembangunan yang disertai pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun mendatang.

- f. Menetapkan rencana kerja dan pendanaan BKAD selama 1 (satu) tahun mendatang.

1. 4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menjelaskan tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, dan mengemukakan capaian-capaian pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra periode sebelumnya.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan hasil penelaah kebijakan nasional dan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran beserta indikatornya, serta perumusan program dan kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan hasil perumusan program dan kegiatan beserta pendanaannya untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja OPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra OPD merupakan kegiatan yang bersifat regular dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra OPD dan prakiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun berjalan.

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur pengeluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran dengan metode penganggaran berbasis kinerja. Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan menggunakan informasi kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan BKAD Kabupaten Bone dalam menyusun program kegiatan BKAD Kabupaten Bone, selain mempunyai tugas dan fungsi koordinator juga melakukan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai bagian dari OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa SKPD selaku PPKD (dalam hal ini BKAD) mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Memperhatikan ketentuan tersebut, nampak bahwa BKAD sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan secara tidak langsung juga mendukung capaian kinerja 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), BKAD Kabupaten Bone yang merupakan representasi dari Misi ke 1 (satu) “**Meningkatkan tata kelola**

pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).” dengan program strategis pemerintah daerah yaitu: *Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah*, yang akan dicapai secara bertahap dan berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 yaitu:

Tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja program kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel. 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021

NO					PROGRAM DAN KEGIATAN	IDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1					3	4	5		6		7		8	9=8/5x100%		10
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	K	Rp.	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Rata - Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknik Perangkat Daerah	100	211.343.760.001	100	43.598.499.390,00	100	40.972.640.686,00	100	0,05	19,39	BKAD
5	02	01	2.01		Perencanaan,Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Realisasi Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen Setiap Tahun Anggaran	49	1.289.252.779	17	313.221.250,00	17	305.501.300,00	17	34,69	23,70	BKAD
5	02	01	2.01	01	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	7	587.509.940	3	67.115.450,00	3	67.027.450,00	3	42,86	11,41	BKAD
5	02	01	2.01	02	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD yang telah disusun	3	95.819.535	1	27.149.200,00	1	27.026.200,00	1	33,33	28,21	BKAD
5	02	01	2.01	04	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD yang telah disusun	3	76.927.710	1	28.193.000,00	1	27.691.650,00	1	33,33	36,00	BKAD
5	02	01	2.01	05	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD yang telah disusun	3	67.229.741	1	27.703.100,00	1	26.840.200,00	1	33,33	39,92	BKAD
5	02	01	2.01	06	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD	21	328.892.523	7	116.135.500,00	7	110.126.100,00	7	33,33	33,48	BKAD
5	02	01	2.01	07	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah	12	132.873.330	4	46.925.000,00	4	46.789.700,00	4	33,33	35,21	BKAD
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Setiap Tahun Anggaran	36	133.269.737.023	12	14.913.697.840,00	12	12.474.586.451,00	12	33,33	9,36	BKAD
5	02	01	2.02	01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang menerima Gaji setahun Anggaran	36	133.269.737.023	12	14.913.697.840,00	12	12.474.586.451,00	12	33,33	9,36	BKAD
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Aparatur Pembina Yang Bersertifikat	369	1.239.508.609	122	174.473.900,00	122	169.833.500,00	122	33,06	13,70	BKAD
5	02	01	2.05	02	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah baju Seragam	330	415.405.000	110	125.500.000,00	110	123.100.000,00	110	33,33	29,63	BKAD
5	02	01	2.05	09	- Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan										BKAD
5	02	01	2.05	10	- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi	3	162.103.609	1	48.973.900,00	1	46.733.500,00	1	33,33	28,83	BKAD

NO					PROGRAM DAN KEGIATAN	IDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	02	01	2.05	11	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek	36	662.000.000	12	-	12	0,00	12	33,33	0,00	BKAD
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Kantor Berbasis IT Setiap Tahun Anggaran	179.823	8.756.609.435	59.941	2.890.045.370,00	59.941	2.885.786.011,00	59.941	33,33	32,96	BKAD
5	02	01	2.06	02	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	45	1.441.990.246	15	616.870.980,00	15	616.856.100,00	15	33,33	42,78	BKAD
5	02	01	2.06	03	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	36	415.195.543	12	76.335.170,00	12	76.334.731,00	12	33,33	18,39	BKAD
5	02	01	2.06	04	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	60	2.295.119.311	20	687.469.320,00	20	686.197.830,00	20	33,33	29,90	BKAD
5	02	01	2.06	05	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Pengandaan	176.226	905.478.635	58.742	297.309.900,00	58.742	297.286.450,00	58.742	33,33	32,83	BKAD
5	02	01	2.06	06	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan	156	993.000.000	52	521.200.000,00	52	519.300.000,00	52	33,33	52,30	BKAD
5	02	01	2.06	09	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	3.300	2.705.825.700	1.100	690.860.000,00	1.100	689.810.900,00	1.100	33,33	25,49	BKAD
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Realisasi Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya	129	1.557.040.550	43	540.627.000,00	43	508.284.000,00	43	33,33	32,64	BKAD
5	02	01	2.07	01	- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Kebutuhan Kendaraan Perorangan Dinas										BKAD
5	02	01	2.07	05	- Pengadaan Mebel	Jumlah Kebutuhan Mebel	45	51.305.000	15	20.622.000,00	15	20.622.000,00	15	33,33	40,19	BKAD
5	02	01	2.07	06	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin	84	1.505.735.550	28	520.005.000,00	28	487.662.000,00	28	33,33	32,39	BKAD
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Realisasi Jasa Penyediaan dan Pelayanan Kantor Setiap Tahun Anggaran	10.869	63.264.103.681	3.948	24.190.171.560,00	3.948	24.057.287.049,00	3.948	36,32	38,03	BKAD
5	02	01	2.08	01	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyedia Surat	10.401	195.395.920	3.467	86.183.200,00	3.467	86.110.900,00	3.467	33,33	44,07	BKAD
5	02	01	2.08	02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Yang di Bayar	108	60.512.328.561	36	23.331.668.360,00	36	23.261.130.576,00	36	33,33	38,44	BKAD
5	02	01	2.08	04	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Pelayanan yang ditetpkan tepat Waktu	360	2.556.379.200	120	772.320.000,00	120	710.045.573,00	120	33,33	27,78	BKAD
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Realisasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Sesuai Kebutuhan	267	1.967.507.924	89	576.262.470,00	89	571.362.375,00	89	33,33	29,04	BKAD

NO					PROGRAM DAN KEGIATAN	IDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	02	01	2.09	01	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Pajak	135	869.689.260	45	275.281.000,00	45	270.959.775,00	45	33,33	31,16	BKAD
5	02	01	2.09	05	- Pemeliharaan Mebel	Jumlah Kebutuhan Mebel	3	84.522.406	1	25.535.470,00	1	25.225.000,00	1	33,33	29,84	BKAD
5	02	01	2.09	06	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kebutuhan Alat Mesin	120	615.660.000	40	186.000.000,00	40	185.927.000,00	40	33,33	30,20	BKAD
5	02	01	2.09	09	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung	9	397.636.258	3	89.446.000,00	3	89.250.600,00	3	33,33	22,45	BKAD
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan Waktu Penetapan APBD dan APBDP Sesuai Ketentuan	Tepat Waktu	1.644.397.754.574	Tepat Waktu	480.235.129.590,00	Tepat Waktu	395.885.445.747,00	Tepat Waktu	50	24,07	BKAD
						Persentase Penyaluran Belanja Daerah Terhadap Total APBD	50		50		50					
						Persentase Belanja Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Total APBD	22		22		22					
						Persentase Penyajian LK SKPD Sesuai SAP Berbasis Akrual (%)	97		97		97					
						Persentase SILPA Terhadap Total APBD (%)	2		2		1					
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	54	11.097.962.630	18	3.052.834.800,00	18	2.886.971.462,00	18	33,33	26,01	BKAD
5	02	02	2.01	01	- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Penyusunan KUA PPAS	6	603.585.948	2	162.212.250,00	2	160.429.750,00	2	33,33	26,58	BKAD
5	02	02	2.01	02	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	6	594.794.588	2	149.356.250,00	2	113.352.188,00	2	33,33	19,06	BKAD
5	02	02	2.01	03	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan KUA dan PPAS yang di verifikasi	6	452.387.630	2	136.673.000,00	2	135.344.250,00	2	33,33	29,92	BKAD
5	02	02	2.01	04	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Perubahan RKA -SKPD	3	452.388.292	1	136.673.200,00	1	118.405.250,00	1	33,33	26,17	BKAD
5	02	02	2.01	05	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan DPA- SKPD	3	502.087.280	1	151.688.000,00	1	149.529.600,00	1	33,33	29,78	BKAD
5	02	02	2.01	06	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA -SKPD	3	502.090.921	1	151.689.100,00	1	140.892.300,00	1	33,33	28,06	BKAD
5	02	02	2.01	07	- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Penyusunan Perda APBD	6	3.921.183.556	2	1.118.445.900,00	2	1.067.883.895,00	2	33,33	27,23	BKAD

NO					PROGRAM DAN KEGIATAN	IDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	02	02	2.01	08	- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah DokumenPertanggungjawaban Perda APBD	6	1.873.900.892	2	425.871.400,00	2	396.883.038,00	2	33,33	21,18	BKAD
5	02	02	2.01	09	- Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi Anggaran	6	1.452.019.381	2	403.276.050,00	2	397.982.375,00	2	33,33	27,41	BKAD
5	02	02	2.01	11	- Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran	6	213.614.160	2	64.536.000,00	2	59.833.800,00	2	33,33	28,01	BKAD
5	02	02	2.01	13	- Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembinaan Penganggaran	3	529.909.982	1	152.413.650,00	1	146.435.016,00	1	33,33	27,63	BKAD
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penatausahaan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	44.397	5.484.893.591	14.811	1.667.067.550,00	14.811	1.596.709.393,00	14.811	33,36	29,11	BKAD
5	02	02	2.02	01	- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Pelaporan Adminstrasi Keuangan	22.500	837.270.458	7.500	292.578.050,00	7.500	288.523.450,00	7.500	33,33	34,46	BKAD
5	02	02	2.02	03	- Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	JJumlah SPD yang diterbitkan	21.783	987.044.317	7.261	298.200.700,00	7.261	281.000.000,00	7.261	33,33	28,47	BKAD
5	02	02	2.02	05	- Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Dana Perimbangan Transfer	36	530.104.775	12	160.152.500,00	12	155.381.800,00	12	33,33	29,31	BKAD
5	02	02	2.02	07	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi aliran KAS dan PFK	36	819.969.750	12	247.725.000,00	12	232.640.750,00	12	33,33	28,37	BKAD
5	02	02	2.02	09	- Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas	36	438.772.773	12	132.559.750,00	12	132.493.050,00	12	33,33	30,20	BKAD
5	02	02	2.02	10	- Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penatausahaan Pertanggungjawaban	6	715.767.640	2	186.617.750,00	2	170.673.150,00	2	33,33	23,84	BKAD
5	02	02	2.02	11	- Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	36	1.155.963.878	12	349.233.800,00	12	335.997.193,00	12	33,33	29,07	BKAD

NO					PROGRAM DAN KEGIATAN	IDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	132	3.732.932.933	24	1.306.726.300,00	24	1.218.817.850,00	24	18,18	32,65	BKAD
5	02	02	2.03	01	- Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas	72	762.172.516	4	265.235.600,00	4	263.136.050,00	4	5,56	34,52	BKAD
5	02	02	2.03	04	- Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Realisasi	12	823.677.943	4	220.620.300,00	4	200.320.000,00	4	33,33	24,32	BKAD
5	02	02	2.03	05	- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perda APBD Penjabaran Pertanggungjawaban	12	1.634.207.904	4	493.718.400,00	4	464.822.000,00	4	33,33	28,44	BKAD
5	02	02	2.03	08	- Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Penyusunan Pertanggungjawaban	12	291.001.298	4	105.959.900,00	4	105.749.550,00	4	33,33	36,34	BKAD
5	02	02	2.03	09	- Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersedianya Sistim Informasi Keuangan Daerah	12	221.873.272	4	67.031.200,00	4	51.938.100,00	4	33,33	23,41	BKAD
5	02	02	2.03	11	- Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang Melakukan Verifikasi Pertanggungjawaban	12	510.272.579	4	154.160.900,00	4	132.852.150,00	4	33,33	26,04	BKAD
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Perencanaan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten Kota	18	1.623.571.692.843	6	474.208.500.940,00	6	390.182.947.042,00	6	33,33	24,03	BKAD
5	02	02	2.04	04	- Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah	Jumlah Dokumen Pembayaran Cicilan Pokok Bunga pinjaman Pemerintah Daerah			0	6.944.309.800,00	1	552.738.259,00	1			BKAD
5	02	02	2.04	08	- Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Perencanaan Penyaluran Bantuan	6	1.483.530.011.511	2	446.496.378.100,00	2	373.508.427.806,00	2	33,33	25,18	BKAD
5	02	02	2.04	09	- Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Pengelolaan Dana Darurat	6	114.500.000.000	2	12.500.000.000,00	2	7.883.237.988,00	2	33,33	6,88	BKAD

NO					PROGRAM DAN KEGIATAN	IDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	02	02	2.04	10	- Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Dana Bagi Hasil	6	25.541.681.332	2	8.267.813.040,00	2	8.238.542.989,00	2	33,33	32,26	BKAD
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah OPD Secara Benar (%)	96	4.357.597.226	86,36	1.449.164.630,00	85	1.344.599.854,00	85	88,98	30,86	BKAD
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	96	4.357.597.226	32	1.449.164.630,00	32	1.344.599.854,00	32	33,33	30,86	BKAD
5	02	03	2.01	01	- Penyusunan Standar Harga	Jumlah Analisis Standar Satuan Harga	12	618.457.447	4	259.721.150,00	4	256.610.772,00	4	33,33	41,49	BKAD
5	02	03	2.01	03	- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Kebutuhan Barang Milik Daerah	6	320.620.965	2	54.974.340,00	2	51.473.950,00	2	33,33	16,05	BKAD
5	02	03	2.01	04	- Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD yang di nilai	12	520.365.928	4	129.900.250,00	4	127.181.750,00	4	33,33	24,44	BKAD
5	02	03	2.01	07	- Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	18	721.867.308	6	335.669.800,00	6	295.440.600,00	6	33,33	40,93	BKAD
5	02	03	2.01	08	- Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD yang di nilai	6	576.930.352	2	188.251.200,00	2	180.416.200,00	2	33,33	31,27	BKAD
5	02	03	2.01	10	- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Aset	30	374.386.818	2	107.055.800,00	2	104.511.200,00	2	6,67	27,92	BKAD
5	02	03	2.01	11	- Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik daerah	6	662.030.915	2	203.793.340,00	2	188.565.258,00	2	33,33	28,48	BKAD
5	02	03	2.01	13	- Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik daerah	6	562.937.493	2	169.798.750,00	2	140.400.124,00	2	33,33	24,94	BKAD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKAD

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi BKAD Kabupaten Bone, dapat diketahui dengan melakukan analisa dengan metode SWOT,

2.2.1. Strength (kekuatan)

1. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Bone dan melakukan evaluasi terhadap Raperda tentang APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bone serta Raperda KDH tentang Pejabaran APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Bone;
2. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone;
3. Memiliki sarana, prasarana dan sistem informasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKAD.

2.2.2. Weaknes (kelemahan)

1. Diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pada tahun anggaran berjalan dan tidak dibarengi dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi;
2. Masih adanya beberapa pegawai yang kurang memiliki kepedulian, memahami etos kerja dan tanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi BKAD serta masih kurangnya disiplin kerja;
3. Belum optimalnya kesempatan peningkatan pendidikan formal/ informal yang disebabkan kompleksitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, ritme dan intensitas pekerjaan yang relatif tinggi;
4. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi serta terbatasnya kesempatan pegawai untuk meningkatkan keahlian, kemampuan dan wawasan, utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2.2.3. Opportunity (peluang)

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa PPKD (dalam hal ini Badan Keuangan dan Aset Daerah) mempunyai tugas, antara lain menyusun rancangan APBD/ rancangan Perubahan APBD, mengesahkan DPA-SKPD, menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan

melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah. Untuk itu, Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi strategis dalam rangka fasilitasi SKPD melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa untuk menunjang kelancaran, konsistensi dan sinkronisasi penyusunan APBD/ dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Bone serta kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan yang lebih tinggi, masing-masing Raperda Kabupaten Bone disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi ;
3. Dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone dapat lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone terkait dengan perencanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2.2.4. Treath (tantangan),

1. Terbitkannya Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, menegaskan adanya perubahan penyusunan Anggaran belanja menggunakan aplikasi SIPD pada tahapan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah dalam APBD tahun Anggaran 2022 menyebabkan terjadinya distorsi data dalam tahapan penatausahaan
2. Masih banyak OPD yang menyajikan Laporan Keuangan dan Aset tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKAD Kabupaten Bone Tahun 2020

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra BKAD				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis	
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2020	TAHUN 2020	TAHUN 2021		TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran			97%	98%	99%	100%	97%	100%	99%	100%		
	Jumlah Rekening yang di Bayar			294 Rekening Listrik	294 Rekening Listrik	294 Rekening Listrik	294 Rekening Listrik	294 Rekening Listrik	294 Rekening Listrik	294 Rekening Listrik	294 Rekening Listrik		
				20 Rekening Air	20 Rekening Air	20 Rekening Air	20 Rekening Air	20 Rekening Air	20 Rekening Air	20 Rekening Air	20 Rekening Air		
				47 Rekening Telpon/Speede	47 Rekening Telpon/Speede	47 Rekening Telpon/Speede	47 Rekening Telpon/Speede	47 Rekening Telpon/Speede	47 Rekening Telpon/Speede	47 Rekening Telpon/Speede	47 Rekening Telpon/Speede		
	Jumlah ASN yang menerima tunjangan			109 ASN	107 ASN	107 ASN	107 ASN	109 ASN	107 ASN	107 ASN	107 ASN		
	Jumlah Media yang Menyediakan Bahan Bacaan			52 Media	52 Media	52 Media	52 Media	52 Media	52 Media	52 Media	52 Media		
	Jumlah SPPD			1000 SPPD	1100 SPPD	1100 SPPD	1150 SPPD	1000 SPPD	1150 SPPD	1100 SPPD	1150 SPPD		
	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran			8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket		
	2	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kinerja Aparatur			98%	99%	100%	100%	98%	100%	100%	100%	
		Jumlah Bangunan Gedung Kantor				1 Gedung			1 Gedung				

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra BKAD				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis		
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2020	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas			3 Unit Motor	2 Unit Motor	1 Unit Mobil		3 Unit Motor		1 Unit Mobil				
	Jumlah Perlengkapan Rumah Dinas			2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit				
	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor			AC 3 Unit	1 Unit		5 Unit	AC 3 Unit	5 Unit		5 Unit			
	Jumlah Peralatan Rumah Jabtan Dinas			2 Unit				2 Unit						
	Jumlah Peralatan Gedung Kantor			Komputer/Pc /Lectop 13 Unit	Komputer/Pc 10 Unit	Komputer/Pc 5 Unit	Komputer/Pc 5 Unit	Komputer/Pc /Lectop 13 Unit	Komputer/Pc 5 Unit	Komputer/Pc 5 Unit	Komputer/Pc 5 Unit			
				Mesin Ketik 1 Unit	Mesin Ketik 1 Unit	Printer 5 Unit	Printer 5 Unit	Mesin Ketik 1 Unit	Printer 5 Unit	Printer 5 Unit	Printer 5 Unit			
				Mesin Absensi 1 Uni	Mesin Absensi 1 Uni	Printer 6 Unit	UPS 3 Unit	UPS 3 Unit	Mesin Absensi 1 Uni	UPS 3 Unit	UPS 3 Unit	UPS 3 Unit		
				Printer 5 Unit					Printer 5 Unit					
				UPS 3 Unit					UPS 3 Unit					
				Kulkas 2 Unit					Kulkas 2 Unit					
				Kamera 1 Unit					Kamera 1 Unit					
				Proyektor 1 Unit					Proyektor 1 Unit					
				GPS Pengukur Tanah 1 Unit					GPS Pengukur Tanah 1 Unit					
	Jumlah Kebutuhan Mebelur			7 Unit	Almari 25 Unit	2 Unit	2 Unit	7 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit			
	Jumlah Pemeliharaan Rumah Jabatan			1 Paket				1 Paket						
	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor			4 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	4 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket			
	Jumlah Mobil dan Motor			Mobil 7 Unit	Mobil 10 Unit	Mobil 10 Unit	Mobil 10 Unit	Mobil 7 Unit	Mobil 10 Unit	Mobil 10 Unit	Mobil 10 Unit			

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra BKAD				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2020	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	yang di Pelihara			33 Motor Dinas	35 Motor Dinas	35 Motor Dinas	35 Motor Dinas	33 Motor Dinas	35 Motor Dinas	35 Motor Dinas	35 Motor Dinas	
	40 Unit			40 Unit	40 Unit	45 Unit	40 Unit	45 Unit	40 Unit	45 Unit		
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur			95%	97%	99%	100%	95%	100%	99%	100%	
4	Jumlah pakaian seragam			110 Set	110 Set	110 Set	110 Set	110 Set	110 Set	110 Set	110 Set	
	Meningkatnya ASN yang memahami tata Kelola Pemerintahan, Keuangan dan Aset dengan baik					100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Pim			1 ASN	2 ASN			1 ASN				
	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek			12 ASN	12 ASN	12 ASN	12 ASN	12 ASN	12 ASN	12 ASN	12 ASN	
	Jumlah Peserta StudiBanding			50 ASN	50 ASN	50 ASN	50 ASN	50 ASN	50 ASN	50 ASN	50 ASN	
	Jumlah Peserta Sosialisasi Pajak			75 Peserta	75 Peserta	75 Peserta	75 Peserta	75 Peserta	75 Peserta	75 Peserta	75 Peserta	
	Meningkatnya Kesesuaian Laporan Kinerja dan Keuangan yang ditetapkan tepat waktu			93%	95%	97%	99%	93%	99%	97%	99%	
	Tersedianya dokumen capaian kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD			5 Dokumen	7 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	
	Jumlah Laporan Realisasi Semester			3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra BKAD				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2020	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Jumlah Desa RTS			20 Desa				20 Desa				
	Jumlah SKPD yang melakukan Verifikasi SPJ			66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	
	Jumlah Laporan SIMON Teptra Bebas Online SKPD dan SPIP			24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	
	Meningkatnya Kualitas Dokumen Acuan Pelaksanaan Program Kegiatan			93%	96%	99%	100%	93%	100%	99%	100%	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	
	Jumlah Informasi yang diupload			20 Berita	25 berita	25 berita	25 berita	20 Berita	25 berita	25 berita	25 berita	
	Jumlah Pelaksanaan Pameran			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
7	Presentase SP2D yang diterbitkan Kurang 2 (dua) Hari terhadap SP2D yang Terbit			98%	99%	100%	100%	98%	100%	100%	100%	
	Jumlah SP2D yang diterbitkan			7450 SP2D	7500 SP2D	7500 SP2D	7500 SP2D	7450 SP2D	7500 SP2D	7500 SP2D	7500 SP2D	
8	Penetapan APBD dan APBD P sesuai Ketentuan			Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
9	Presentase Penyajian LK SKPD sesuai SAP berbasis Akrua			90.13%	93.74%	97.49%	100%	90.13%	100%	97.49%	100%	

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra BKAD				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2020	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Presentase Penyaluran Belanja Daerah			98%	98%	100%	100%	98%	100%	100%	100%	
11	Presentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah Secara Benar			77.27%	81.82%	86.36%	90.91%	77.27%	90.91%	86.36%	90.91%	
12	Presentase Dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Standar Satuan Harga Barang/ RKBMD yang disusun dan ditetapkan Tepat Waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13	Presentase Bidang Lahan Aset Daerah yang Bersertifikat Hak Guna Bangunan			29.69%	29.78%	29.86%	29.94%	29.69%	29.94%	29.86%	29.94%	
	Jumlah Dokumen Standar Harga Satuan Barang			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Perda APBD			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Perda APBD			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Perda APBD Perubahan			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Perda APBD Penjabaran perubahan			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Perda APBD Pertanggungjawaban			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra BKAD				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2020	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Dokumen perda APBD Penjabaran Pertanggungjawaban			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Tersedianya Sistem Informasi Keuangan Daerah			1 Software	1 Software	1 Software	1 Software	1 Software	1 Software	1 Software	1 Software	
	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi			8 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	8 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	
	Jumlah Pelaksanaan Manajemen Pengelolaan Aset Daerah			3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	
	Jumlah DPA dan DPPA SKPD			132 DPA/DPPA	132 DPA/DPPA	132 DPA/DPPA	132 DPA/DPPA	132 DPA/DPPA	132 DPA/DPPA	132 DPA/DPPA	132 DPA/DPPA	
	Daftar Aset yang dimiliki			66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	
	Jumlah Dokumen Rancangan PPAS APBD dan Rancangan Nota Keuangan APBD			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Terlaksananya Monev aplikasi SIMDA			1 Software	1 Software	1 Software	1 Software	1 Software	1 Software	1 Software	1 Software	
	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan dan Penghapusan Asset			2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	
	Tersedianya Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan dan Pemeliharaan Barang/Jasa			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
Jumlah Peserta Bimtek/Angkatan	70 ASN			70 ASN	70 ASN	70 ASN	70 ASN	70 ASN	70 ASN	70 ASN		

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra BKAD				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2020	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Jumlah Faktur Pajak			820 Faktur	820 Faktur	820 Faktur	820 Faktur	820 Faktur	820 Faktur	820 Faktur	820 Faktur	
	Jumlah SKPD yang diNilai			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
	Jumlah SKPD yang dibina dalam penggunaan aplikasi penganggaran			66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	
	Jumlah pelaksanaan Administrasi Data Kearsipan Keuangan			12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	
	Jumlah SPM yang diterbitkan			7000 SPM	7000 SPM	7000 SPM	7000 SPM	7000 SPM	7000 SPM	7000 SPM	7000 SPM	
	Jumlah Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
	Jumlah Pelaksanaan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah			66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	
	Jumlah Laporan PertanggungJawaban Pelaksanaa APBD			792 Laporan	792 Laporan	792 Laporan	792 Laporan	792 Laporan	792 Laporan	792 Laporan	792 Laporan	
	Jumlah Laporan Aset			2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	
	Jumlah PNS yang Menerima Gaji			9372 PNS	9372 PNS	9372 PNS	9372 PNS	9372 PNS	9372 PNS	9372 PNS	9372 PNS	
	Jumlah Sertifikat Hak Guna Bangunan			15 HGB	15 HGB	15 HGB	15 HGB	15 HGB	15 HGB	15 HGB	15 HGB	
	Jumlah Perda dan Perkada					2 Perda				2 Perda		
	Presentae Pengembalian atas Kerugian Negara			96%	97%	98%	99%	96%	99%	98%	99%	
	Jumlah Kasus TGR			10 Kasus	12 Kasus	12 Kasus	12 Kasus	10 Kasus	12 Kasus	12 Kasus	12 Kasus	

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKAD Kabupaten Bone Tahun 2021
(Permendagri 90 Tahun 2019) Perubahan nomenklatur

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA		REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
	Persentase Rata - Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknik Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
1	Cakupan Realisasi Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen Setiap Tahun Anggaran	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	
2	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Setiap Tahun Anggaran	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang / Bulan	48 Orang / Bulan	12 Bulan	48 Orang / Bulan	48 Orang / Bulan	
3	Persentase Ketersediaan Aparatur Pembina Yang Bersertifikat	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA		REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	106 Paket	106 Paket	106 Paket	106 Paket	106 Paket	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	
	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	
	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	43 Orang	43 Orang	12 Orang	43 Orang	43 Orang	
4	Cakupan Ketersediaan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Kantor Berbasis IT Setiap Tahun Anggaran	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
5	Cakupan Realisasi Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	19 Paket	19 Paket	19 Paket	19 Paket	19 Paket	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	22 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	
6	Cakupan Realisasi Jasa Penyediaan dan Pelayanan Kantor Setiap Tahun Anggaran	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA		REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 Rekening	36 Rekening	36 Rekening	36 Rekening	36 Rekening	
	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
7	Cakupan Realisasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Sesuai Kebutuhan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	
	Jumlah Mebel yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	180 Unit	180 Unit	40 Unit	180 Unit	180 Unit	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara atau di rehabilitasi	1 Unit	1 Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	
	Ketepatan Waktu Penetapan APBD dan APBDP Sesuai Ketentuan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
	Persentase Penyaluran Belanja Daerah Terhadap Total APBD	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	
	Persentase Belanja Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Total APBD	22 Persen	22 Persen	22 Persen	22 Persen	22 Persen	
	Persentase Penyajian LK SKPD Sesuai SAP Berbasis Akual (%)	97 Persen	97 Persen	97 Persen	97 Persen	97 Persen	
	Persentase SILPA Terhadap Total APBD (%)	1 Persen	1 Persen	1 Persen	1 Persen	1 Persen	
8	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Jumlah RKA - SKPD yang Di Verifikasi	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA		REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
	Jumlah Perubahan RKA - SKPD yang di Verifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah DPA - SKPD Yang Diverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah Perubahan DPA - SKPD Yang Di Verifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	132 Orang	132 Orang	132 Orang	132 Orang	132 Orang	
9	Persentase Penatausahaan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	7500 SP2D	7500 SP2D	7500 SP2D	7500 SP2D	7500 SP2D	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	7261 SPM	7261 SPM	7261 SPM	7261 SPM	7261 SPM	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	
	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan atau Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan atau Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA		REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	
	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggung Jawabab Sub Kegiatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	132 Orang	132 Orang	132 Orang	132 Orang	132 Orang	
10	Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	
	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Terkonsolidasi	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	
	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA		REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	
	Jumlah Orang Yang Mengikut Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	132 Orang	132 Orang	132 Orang	132 Orang	132 Orang	
11	Persentase Perencanaan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten Kota	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	
	Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah OPD Secara Benar (%)	100 Persen	100 Persen	85 Persen	100 Persen	100 Persen	
12	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
	Jumlah Standar Harga Yang Disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	
	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	
	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA		REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	
	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	132 Orang	132 Orang	132 Orang	132 Orang	132 Orang	

Tabel 2.4
Perubahan Indikator Dalam Pencapaian Kinerja BKAD
Tahun 2020 - 2023

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019		PERMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021		PENANGGUNG JAWAB
		INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR BARU	TARGET	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Rata - Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknik Perangkat Daerah	100 Persen	Persentase Rata - Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknik Perangkat Daerah	100 Persen	
1	Perencanaan,Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Realisasi Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen Setiap Tahun Anggaran	17 Dokumen	Cakupan Realisasi Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen Setiap Tahun Anggaran	16 Dokumen	
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD yang telah disusun	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen	
	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD yang telah disusun	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	1 Dokumen	
	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD yang telah disusun	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	1 Dokumen	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD	7 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Setiap Tahun Anggaran	100 persen	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Setiap Tahun Anggaran	100 persen	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang menerima Gaji setahun Anggaran	12 Bulan	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang / Bulan	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Aparatur Pembina Yang Bersertifikat	100 Persen	Persentase Ketersediaan Aparatur Pembina Yang Bersertifikat	100 Persen	
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah baju Seragam	110 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	106 Paket	
	- Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019		PERMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021		PENANGGUNG JAWAB
		INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR BARU	TARGET	
	- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi	1 Kegiatan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	1 Kegiatan	
	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek	12 Orang	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	43 Orang	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Kantor Berbasis IT Setiap Tahun Anggaran	100 Persen	Cakupan Ketersediaan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Kantor Berbasis IT Setiap Tahun Anggaran	100 Persen	
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	15 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	15 Paket	
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 Paket	
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	20 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20 Paket	
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Pengandaan	58742 Lembar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	58742 Lembar	
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan	52 Media	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan	52 Media	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	1100 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1100 Laporan	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Realisasi Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya	100 Persen	Cakupan Realisasi Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya	100 Persen	
	- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Kebutuhan Kendaraan Perorangan Dinas		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 Unit	
	- Pengadaan Mebel	Jumlah Kebutuhan Mebel	15 Unit	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	19 Unit	
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin	28 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	22 Unit	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Realisasi Jasa Penyediaan dan Pelayanan Kantor Setiap Tahun Anggaran	100 Persen	Cakupan Realisasi Jasa Penyediaan dan Pelayanan Kantor Setiap Tahun Anggaran	100 Persen	
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyedia Surat	3467 Surat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	3467 Surat	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Yang di Bayar	36 Rekening	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 Rekening	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Pelayanan yang ditetpkan tepat Waktu	120 Aparatur	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	120 Aparatur	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Realisasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Sesuai Kebutuhan	100 Persen	Cakupan Realisasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Sesuai Kebutuhan	100 Persen	
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Pajak	45 Laporan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	45 Laporan	
	- Pemeliharaan Mebel	Jumlah Kebutuhan Mebel	1			
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kebutuhan Alat Mesin	40 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	180 Unit	
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung	3 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara atau di rehabilitasi	1 Unit	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan Waktu Penetapan APBD dan APBDP Sesuai Ketentuan	Tepat Waktu	Ketepatan Waktu Penetapan APBD dan APBDP Sesuai Ketentuan	Tepat Waktu	

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019		PERMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021		PENANGGUNG JAWAB
		INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR BARU	TARGET	
		Persentase Penyaluran Belanja Daerah Terhadap Total APBD	50 Persen	Persentase Penyaluran Belanja Daerah Terhadap Total APBD	50 Persen	
		Persentase Belanja Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Total APBD	21,96 Persen	Persentase Belanja Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Total APBD	22 Persen	
		Persentase Penyajian LK SKPD Sesuai SAP Berbasis Akrua (%)	97,49 Persen	Persentase Penyajian LK SKPD Sesuai SAP Berbasis Akrua (%)	97 Persen	
		Persentase SILPA Terhadap Total APBD (%)	2,41 Persen	Persentase SILPA Terhadap Total APBD (%)	1 Persen	
8	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 Persen	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 Persen	
	- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Penyusunan KUA PPAS	2 Dokumen	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen	
	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2 Dokumen	
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan KUA dan PPAS yang di verifikasi	2 Dokumen	Jumlah RKA - SKPD yang Di Verifikasi	2 Dokumen	
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Perubahan RKA -SKPD	1 Dokumen	Jumlah Perubahan RKA - SKPD yang di Verifikasi	2 Dokumen	
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan DPA- SKPD	1 Dokumen	Jumlah DPA - SKPD Yang Diverifikasi	1 Dokumen	
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA -SKPD	1 Dokumen	Jumlah Perubahan DPA - SKPD Yang Di Verifikasi	1 Dokumen	
	- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Penyusunan Perda APBD	2 Dokumen	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	
	- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah DokumenPertanggungjawaban Perda APBD	2 Dokumen	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	
	- Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi Anggaran	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	
	- Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	
	- Pembinaan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembinaan Penganggaran	1 Dokumen	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	1 Dokumen	
9	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penatausahaan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 Persen	Persentase Penatausahaan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 Persen	
	- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Pelaporan Adminstrasi Keuangan	7500 SP2D	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	7500 SP2D	
	- Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah SPD yang diterbitkan	7261 SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	7261 SPM	
	- Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Dana Perimbangan Transfer	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019		PERMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021		PENANGGUNG JAWAB
		INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR BARU	TARGET	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi aliran KAS dan PFK	12 Dokumen	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan atau Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan atau Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	12 Dokumen	
	- Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas	12 Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Laporan	
	- Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penatausahaan Pertanggungjawaban	2 Dokumen	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 Dokumen	
	- Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	12 Dokumen	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	12 Dokumen	
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	100 Persen	Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	100 Persen	
	- Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas	4 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Laporan	
	- Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Realisasi	4 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Terkonsolidasi	4 Laporan	
	- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perda APBD Penjabaran Pertanggungjawaban	4 Dokumen	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota	4 Dokumen	
	- Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Penyusunan Pertanggungjawaban	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	4 Dokumen	
	- Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersedianya Sistem Informasi Keuangan Daerah	4 Dokumen	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	4 Dokumen	
	- Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang Melakukan Verifikasi Pertanggungjawaban	4 Laporan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	4 Laporan	
11	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Perencanaan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten Kota	100 Persen	Persentase Perencanaan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten Kota	100 Persen	
	- Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah	Jumlah Dokumen Pembayaran Cicilan Pokok Bunga pinjaman Pemerintah Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	
	- Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Perencanaan Penyaluran Bantuan	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2 Laporan	
	- Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Pengelolaan Dana Darurat	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan	
	- Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Dana Bagi Hasil	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	2 Laporan	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah OPD Secara Benar (%)	100 Persen	Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah OPD Secara Benar (%)	100 Persen	

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019		PERMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021		PENANGGUNG JAWAB
		INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR BARU	TARGET	
12	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 Persen	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 Persen	
	- Penyusunan Standar Harga	Jumlah Analisis Standar Satuan Harga	4 Dokumen	Jumlah Standar Harga Yang Disusun	4 Dokumen	
	- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	
	- Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD yang di nilai	4 Dokumen	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	
	- Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	6 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	6 Laporan	
	- Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD yang di nilai	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	
	- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Aset	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	
	- Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	
	- Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik daerah	2 Laporan	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	2 Laporan	

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone

Isu-isu atau permasalahan – permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan nilai-nilai yang berkembang, situasi dan kondisi baik dari lingkungan internal maupun eksternalnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perencanaan Keuangan Daerah

Perencanaan keuangan daerah dimulai dari perencanaan keuangan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kemudian dikoordinasikan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang anggotanya termasuk Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Hasil koordinasi perencanaan keuangan pada TAPD selanjutnya dibahas bersama dengan Tim Badan Anggaran DPRD. Adapun identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam rangka Perencanaan Keuangan Daerah adalah:

- a. Proses pembahasan RAPBD Kabupaten Bone pada DPRD masih didominasi pendekatan politis, sehingga pembahasan rancangan APBD seringkali berlangsung alot, yang mengakibatkan penetapan APBD juga berlangsung lama;
- b. Kemampuan keuangan daerah yang tidak seimbang dengan perencanaan belanja pada program dan kegiatan di masing-masing OPD, sehingga mengakibatkan banyak program dan kegiatan yang kurang mendapat dukungan dari segi pendanaan;
- c. Adanya OPD yang belum mengikuti perkembangan regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah dalam penyusunan RKA, sehingga masih sering diperoleh rekomendasi perbaikan dari hasil evaluasi BPKD Provinsi atas RAPBD Kabupaten;
- d. Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran yang masih perlu ditingkatkan, baik dari segi ketepatan waktu maupun kualitas dari dokumen tersebut;
- e. Proporsi pengalokasian belanja pembangunan lebih rendah dibandingkan belanja aparatur;

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam rangka Perencanaan Keuangan Daerah dapat disimpulkan bahwa *belum optimalnya fungsi perencanaan dan distribusi dalam penyusunan APBD.*

2. Perbendaharaan Keuangan Daerah

Pengelolaan administrasi perbendaharaan yang tertib dan cepat adalah salah satu aspek yang penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Tertib dapat diartikan bahwa proses administrasi perbendaharaan dilakukan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penerbitan SPM, SP2D harus memenuhi syarat kelengkapan, sehingga proses penerbitan SP2D dapat berjalan dengan lancar

Adapun identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam Perbendaharaan Keuangan Daerah, adalah dalam pengelolaan gaji SIM gaji seharusnya tidak lagi memakai Destop dalam Pelaporan Keuangan Daerah .

3. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Raihan Opini WTP dari BPK RI atas LKPD Kabupaten Bone selama 7 kali sejak tahun 2015-2021 merupakan kebanggaan sekaligus pencapaian yang maksimal atas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam hal pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Untuk itu, ke depannya, prestasi ini harus terus menerus dipertahankan dengan cara meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah, khususnya dalam transparansi pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan APBD, sehingga publik dapat mengakses informasi yang handal terkait capaian dari pengelolaan APBD Kabupaten Bone.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan pelaporan keuangan Daerah adalah adanya kesalahan penganggaran yang tidak sesuai dengan realisasi belanja .

4. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Selain itu, Adapun identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam rangka Pelaporan Keuangan dan Aset Daerah adalah;

1. Khusus Aset tanah masih terdapat beberapa bidang tanah yang belum dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah (sertifikat) dan Aset Tanah yang telah dilengkapi dokumen kepemilikan akan memberi nilai tambah atas asset tersebut
2. Untuk kendaraan Dinas roda Dua dan Roda Empat masih terdapat beberapa kendaraan yang tidak memiliki bukti kepemilikan (BPKB)
3. Masih terdapat Barang Milik Daerah (kendaraan Dinas) yang masih dikuasai oleh yang tidak berhak. Antara lain, orang sudah pensiun masih menguasai kendaraan dinas

4. Penatausahaan Asset SKPD belum sepenuhnya sesuai harapan
5. Proses pengsertifikatan lahan yang membutuhkan waktu dan beberapa Aset yang pada SKPD dikuasai oleh orang yang tidak berhak, seperti orang yang sudah pensiun dan mutasi SKPD

5. Layanan Administrasi Perkantoran

Untuk menghasilkan kinerja yang baik, maka suatu organisasi membutuhkan layanan administrasi perkantoran yang dikelola dengan baik dan cepat. Berbagai layanan administrasi perencanaan, keuangan, hingga administrasi kepegawaian dan umum harus diupayakan terlaksana dengan baik dan dapat memenuhi standar pelayanan pemerintahan yang baik, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi PNS dan juga stake holder lainnya. Olehnya itu dibutuhkan Standar Operasional Prosedur untuk masing-masing layanan administrasi yang diberikan kepada pihak luar disertai pemanfaatan penggunaan teknologi informasi yang mampu menghadirkan kecepatan layanan administrasi.

Identifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam rangka Layanan Administrasi Perkantoran, adalah:

- a. Standar Operasional Prosedur untuk masing-masing layanan administrasi disertai pemanfaatan penggunaan teknologi informasi yang mampu menghadirkan kecepatan layanan administrasi;
- b. Kegiatan sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya adalah salah satu cara bagi aparatur untuk terus memperbaharui sekaligus meningkatkan wawasan/kemampuan, baik dalam hal pengelolaan keuangan, maupun administrasi umum dan pemerintahan lainnya. Untuk itu, ke depan diharapkan PNS lingkup BKAD dapat secara rutin ditugaskan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan sumber daya aparatur, baik PNS pria maupun perempuan, golongan II, III hingga golongan IV dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu, hingga muaranya adalah pemerataan kualitas SDM lingkup BKAD yang memahami dan mampu menjalankan tupoksi yang melekat pada BKAD secara professional;
- c. Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan dan Kinerja BKAD Kabupaten Bone yang masih perlu ditingkatkan, baik dari segi ketepatan waktu maupun kualitas dari dokumen tersebut.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam rangka Pelaporan Keuangan dan Aset Daerah dapat disimpulkan bahwa *belum optimalnya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusi Aparatur lingkup BKAD.*

Permasalahan tersebut terjadi karena faktor – faktor yang mempengaruhi antara lain :

- Belum Optimalnya pengelolaan Keuangan daerah yang bersih, Transparan dan Akuntabel
- Belum Optimalnya penatausahaan Barang Milik Daerah.

Beberapa hal yang diperlukan dalam mengatasi isu-isu penting tersebut adalah sebagai berikut:

- Terbentuknya pengelolaan keuangan daerah yang semakin Efisien berlandaskan pada aturan pengelolaan keuangan yang jelas dan mudah dipahami dan dilaksanakan;
- Terwujudnya Peningkatan kualitas SDM yang memadai dan mempunyai kapasitas sesuai dengan harapan;
- Terciptanya kebijakan-kebijakan yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Peningkatan Koordinasi antar OPD dalam rangka menciptakan kebersamaan dalam pencapaian satu tujuan, satu pikiran guna peningkatan pembangunan daerah;
- Terlaksananya sosialisasi, bimtek dan pelatihan tentang pengelolaan keuangan daerah terhadap pelaksana teknis kegiatan;
- Terciptanya *Reward* dan *Punishment* yang jelas terhadap pelaksanaan peraturan yang ditetapkan terkait APBD Daerah;
- Penyusunan Kebijakan akuntansi sesuai dengan Juknis Permendagri dan Permenkeu serta Pelaksanaan Sosialisai terkait tentang Standar Akuntansi Pemerintah kepada pelaksana teknis kegiatan;
- Pengelolaan dan Inventarisasi aset yang tertib dan berbasis Teknologi Informasi serta Peningkatan kualitas SDM khususnya pengurus barang

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, misalnya rumusan program dan kegiatan baru yang terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan sudah sesuai namun besarannya berbeda. Penjelasan tersebut dapat diuraikan pada Tabel 2.3 sebagai berikut

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Rata - Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknik Perangkat Daerah	100 Persen	35.011.096.429	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Rata - Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknik Perangkat Daerah	100 Persen	31.942.115.217	
1	Perencanaan,Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Cakupan Realisasi Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen Setiap Tahun Anggaran	100 persen	430.820.350	Perencanaan,Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Cakupan Realisasi Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen Setiap Tahun Anggaran	100 persen	444.820.350	
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	155.162.650	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	155.162.650	
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen	72.245.000	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen	72.245.000	
	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	1 Dokumen	23.349.050	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	1 Dokumen	23.349.050	
	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	1 Dokumen	31.306.350	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	1 Dokumen	31.306.350	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	118.560.000	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	132.560.000	
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	30.197.300	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	30.197.300	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Setiap Tahun Anggaran	100 persen	7.795.118.079	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Setiap Tahun Anggaran	100 persen	6.549.360.475	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang / Bulan	7.795.118.079	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang / Bulan	6.549.360.475	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Ketersediaan Aparatur Pembina Yang Bersertifikat	100 persen	449.077.600	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Ketersediaan Aparatur Pembina Yang Bersertifikat	100 persen	445.767.600	
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	106 Paket	79.500.000	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	106 Paket	79.500.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	- Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan Fungsinya	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang	352.157.016	- Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan Fungsinya		Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	-	
	- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	150 Orang	90.577.600	- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	150 Orang	90.577.600	
	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	43 Orang	215.000.000	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	43 Orang	215.000.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Cakupan Ketersediaan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Kantor Berbasis IT Setiap Tahun Anggaran	100 persen	2.047.401.316	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Cakupan Ketersediaan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Kantor Berbasis IT Setiap Tahun Anggaran	100 persen	2.048.490.650	
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	352.157.016	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	352.437.050	
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 Paket	81.757.300	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 Paket	81.740.300	
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	399.845.600	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	400.671.900	
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	162.841.400	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	162.841.400	
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan	12 Dokumen	450.000.000	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan	12 Dokumen	450.000.000	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	600.800.000	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	600.800.000	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Cakupan Realisasi Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya	100 persen	947.345.350	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Cakupan Realisasi Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya	100 persen	718.709.880	
	- Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan yan disediakan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Unit kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan yan disediakan	1 Unit	-	Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Unit kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan yan disediakan	1 Unit	-	
	- Pengadaan Mebel	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	19 Unit	46.000.000	- Pengadaan Mebel	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	19 Unit	46.322.000	
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	22 Unit	387.495.350	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	22 Unit	294.437.880	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Cakupan Realisasi Jasa Penyediaan dan Pelayanan Kantor Setiap Tahun Anggaran	100 persen	22.895.528.434	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Cakupan Realisasi Jasa Penyediaan dan Pelayanan Kantor Setiap Tahun Anggaran	100 persen	21.256.741.662	
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	83.108.700	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	83.108.700	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 Rekening	21.655.572.534	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 Rekening	20.452.168.962	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	120 Laporan	1.156.847.200	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	120 Laporan	721.464.000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Cakupan Realisasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Sesuai Kebutuhan	100 persen	445.805.300	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Cakupan Realisasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Sesuai Kebutuhan	100 persen	478.224.600	
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Laporan	176.850.000	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Laporan	176.850.000	
	- Pemeliharaan Mebel	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	1 Unit	30.897.919	- Pemeliharaan Mebel	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Mebel Yang Diperbaiki	1 unit	339.877.117	
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	180 Unit	106.900.000	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	180 Unit	106.900.000	
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara atau di rehabilitasi	1 Paket	162.055.300	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara atau di rehabilitasi	1 Paket	194.474.600	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kec. Tanete Riattang Barat	Ketepatan Waktu Penetapan APBD dan APBDP Sesuai Ketentuan	Tepat Waktu	464.505.215.848	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kec. Tanete Riattang Barat	Ketepatan Waktu Penetapan APBD dan APBDP Sesuai Ketentuan	Tepat Waktu	480.984.513.117	
		Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Penyaluran Belanja Daerah Terhadap Total APBD	50 Persen			Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Penyaluran Belanja Daerah Terhadap Total APBD	50 Persen		
		Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Belanja Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Total APBD	22 Persen			Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Belanja Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Total APBD	22 Persen		
		Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Penyajian LK SKPD Sesuai SAP Berbasis Akrua (%)	97 Persen			Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Penyajian LK SKPD Sesuai SAP Berbasis Akrua (%)	97 Persen		
		Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase SILPA Terhadap Total APBD (%)	1 Persen			Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase SILPA Terhadap Total APBD (%)	1 Persen		
8	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 Persen	2.895.103.620	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 Persen	2.895.103.620	
	- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen	141.414.250	- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen	141.414.250	

NO	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2 Dokumen	148.719.600	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2 Dokumen	148.719.600	
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah RKA - SKPD yang Di Verifikasi	2 Dokumen	174.940.680	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah RKA - SKPD yang Di Verifikasi	2 Dokumen	174.940.680	
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Perubahan RKA - SKPD yang di Verifikasi	2 Dokumen	184.280.980	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Perubahan RKA - SKPD yang di Verifikasi	2 Dokumen	184.280.980	
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah DPA - SKPD Yang Diverifikasi	1 Dokumen	84.644.360	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah DPA - SKPD Yang Diverifikasi	1 Dokumen	99.111.360	
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Perubahan DPA - SKPD Yang Di Verifikasi	1 Dokumen	85.173.200	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Perubahan DPA - SKPD Yang Di Verifikasi	1 Dokumen	85.173.200	
	- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	1.039.986.800	- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	1.039.986.800	
	- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	281.459.300	- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	281.459.300	
	- Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	399.297.100	- Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	399.297.100	
	- Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	200.353.800	- Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	200.353.800	
	- Pembinaan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	132 orang	154.833.550	- Pembinaan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	132 orang	140.366.550	
9	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Penatausahaan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 Persen	1.707.067.550	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Penatausahaan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 Persen	1.707.067.550	
	- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	7500 SP2D	302.951.800	- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	7500 SP2D	367.951.800	
	- Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	7261 SPM	321.800.700	- Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	7261 SPM	256.800.700	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
-	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	160.152.500	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	160.152.500	
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan atau Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan atau Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Dokumen	247.725.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan atau Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Dokumen	247.725.000	
-	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Laporan	152.559.750	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Laporan	152.559.750	
-	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 Dokumen	192.644.000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 Dokumen	192.644.000	
-	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	132 Orang	329.233.800	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	132 Orang	329.233.800	
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	100 Persen	1.331.994.440	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	100 Persen	1.331.994.410	
-	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Laporan	260.226.150	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Laporan	258.482.460	
-	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Terkonsolidasi	4 Laporan	191.789.850	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Terkonsolidasi	4 Laporan	196.539.320	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
-	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota	4 Dokumen	510.921.410	- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota	4 Dokumen	508.510.580	
-	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	4 Dokumen	141.228.130	- Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	4 Dokumen	145.033.810	
-	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	4 Dokumen	70.533.750	- Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	4 Dokumen	71.013.340	
-	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Orang Yang Mengikut Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	132 Orang	157.295.150	- Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Orang Yang Mengikut Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	132 Oran	152.414.900	
11	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Perencanaan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten Kota	100 Persen	455.071.050.238	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Perencanaan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten Kota	100 Persen	475.050.347.537	
-	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	15.810.557.950	- Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	18.494.326.702	
-	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2 Laporan	417.738.463.649	- Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2 Laporan	442.783.992.196	
-	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan	12.750.000.000	- Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan	5.000.000.000	
-	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	2 Laporan	8.772.028.639	- Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	2 Laporan	8.772.028.639	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah OPD Secara Benar (%)	100 Persen	1.364.429.088	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah OPD Secara Benar (%)	100 Persen	1.364.429.080	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
12	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 Persen	1.364.429.088	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 Persen	1.364.429.080	
	- Penyusunan Standar Harga	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Standar Harga Yang Disusun	4 Dokumen	270.959.700	- Penyusunan Standar Harga	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Standar Harga Yang Disusun	4 Dokumen	270.959.700	
	- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	77.371.860	- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	77.371.860	
	- Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	147.780.590	- Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	147.780.590	
	- Pengamanan Barang Milik Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	6 Laporan	293.085.570	- Pengamanan Barang Milik Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	6 Laporan	293.085.570	
	- Penilaian Barang Milik Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	166.806.840	- Penilaian Barang Milik Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	166.806.840	
	- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	111.502.540	- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	111.502.540	
	- Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	187.385.300	- Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	187.385.300	
	- Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	132 Orang	109.536.680	- Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	132 Orang	109.536.680	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 94 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk perencanaan program dan kegiatan tahun 2023 tidak melakukan pengumpulan usulan program dan kegiatan masyarakat karena hanya menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas.

Namun demikian terkait dengan usulan alokasi dana untuk BKAD mengalokasikan anggaran dalam belanja Belanja transfer berdasar rekomendasi di OPD yang sesuai kewenangannya.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3. 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri RI

Adapun Visi Kementerian Dalam Negeri RI adalah *"Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"*. Berdasarkan Visi tersebut Kemendagri merumuskan tujuan yaitu diantaranya *"Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah"*, dengan sasaran strategis meningkatkannya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis Kemendagri RI tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif

1. Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif.
Partisipatif merupakan perwujudan penyusunan penganggaran daerah yang melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan.
Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
3. Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien
Efektif merupakan pencapaian keluaran dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertinggi.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel.
Akuntabel merupakan perwujudan pelaporan keuangan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah yang kompetitif.
Kompetitif merupakan perwujudan pengelolaan keuangan yang berkualitas dan dapat diperbandingkan dengan yang lain.

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kemendagri RI telah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategis sebagai berikut:

1. Mendorong penetapan Perda tentang APBD Provinsi/ Kabupaten/Kota secara tepat waktu;
2. Mendorong penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi /Kabupaten/Kota secara tepat waktu;
3. Mendorong Peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD
4. Mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual di Daerah
5. Peningkatan kualitas belanja pada APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, terutama untuk pembangunan infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan dan perumahan;
6. Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Barang Milik Daerah (BMD);
7. Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah;

Mengkaji visi dan misi Kementerian Dalam Negeri RI memberikan tantangan bagi BKAD Kabupaten Bone untuk:

1. Mendorong penetapan Perda tentang APBD dan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bone secara tepat waktu;
2. Mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Daerah;
3. Meningkatkan kualitas belanja pada pelayanan masyarakat, terutama bidang infrastruktur 5%, bidang kesehatan 10%, dan bidang pendidikan 20%; dan
4. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan kemampuan fiskal daerah.

Adapun Visi dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri RI adalah *"Terkemuka dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif"*

Untuk mewujudkan visi tersebut misi yang diemban adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran daerah;
2. Mendorong peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan investasi dan kekayaan daerah;
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan dana perimbangan;

4. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
5. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan Daerah.

Mengkaji visi dan misi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah memberikan tantangan bagi BKAD Kabupaten Bone untuk:

1. Mendorong terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien;
2. Mendorong peningkatan pendapatan daerah;
3. Mendorong peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah.

Telaah Renstra Kementerian Keuangan RI

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2015-2019, dapat dijabarkan Arah dan Kebijakan Kementerian Keuangan RI yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone yakni sebagai berikut:

Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah, melalui strategi:

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah adalah:

- a. Perencanaan dan Pelaksanaan anggaran yang berkualitas;
 - b. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang Adil dan Transparan
- Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam rangka Perencanaan anggaran yang berkualitas adalah:
- 1) Pengurangan pendanaan bagi kegiatan yang konsumtif dalam alokasi anggaran Kementerian/Lembaga;
 - 2) Pencanangan program penghematan dengan pengurangan frekuensi perjalanan dinas, rapat di luar kantor, pembatasan pembelian kendaraan dan pembangunan gedung baru, pengurangan aktivitas seremonial, dan pengutamaan konsumsi atau penggunaan produk dalam negeri (quick wins);
 - 3) Pemantapan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) untuk meningkatkan disiplin dan kepastian fiskal;
 - 4) Penataan remunerasi aparatur negara dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
 - 5) Memprioritaskan alokasi belanja yang bersifat mandatory spending seperti anggaran pendidikan, penyediaan dana desa dan lainnya;

- 6) Memprioritaskan alokasi belanja untuk mendanai isu strategis jangka menengah yang memegang peran penting dalam pencapaian prioritas nasional seperti pembangunan infrastruktur konektivitas, pemenuhan alutsista TNI, ketahanan pangan dan energy;
- 7) Peningkatan sinergi dan kapasitas stakeholders penganggaran.

Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam rangka mewujudkan hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan adalah;

- 1) Percepatan pelaksanaan pengalihan anggaran pusat ke daerah untuk fungsi- fungsi yang telah menjadi wewenang daerah, mengalihkan secara bertahap danadekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan mempengaruhi pola belanja daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- 2) Mengembangkan pendapatan daerah yang efektif dan efisien;
- 3) Mengembangkan system transfer yang meminimumkan ketimpangan horizontal dan vertikal serta memperbaiki kualitas pelayanan;
- 4) Mengharmonisasikan belanja pusat dan daerah agar belanja daerah menjadi efektif dan efisien;
- 5) Memperluas akses daerah terhadap sumber pembiayaan pinjaman dan diminati oleh daerah untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur daerah dan penyediaan pelayanan publik;
- 6) Menyusun pemerinkatan daerah sebagai bentuk penilaian kinerja keuangan daerah yang terintegrasi dengan mekanisme pemberian insentif;
- 7) Meningkatkan efektifitas monitoring dan evaluasi dana transfer yang bersifat spesifik;
- 8) Meningkatkan kualitas belanja daerah dan mengembangkan keleluasaan belanja daerah yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik dasar.

Telaah Renstra Badan Pemeriksa Keuangan RI

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2016-2020, dapat dijabarkan Arah dan Kebijakan yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah yakni sebagai berikut:

Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara, melalui strategi:

Meningkatkan efektivitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Strategi ini difokuskan pada penyempurnaan proses komunikasi BPK, sebagai suatu organisasi, dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan

harapan para pemangku kepentingannya., bentuk pemenuhan kebutuhan dan harapan dari para pemangku kepentingan dapat berupa pemberian pendapat, penghitungan kerugian negara, pertimbangan terhadap standar akuntansi pemerintah, pemberian pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, serta pemberian keterangan ahli. Agar komunikasi yang dibangun lebih efektif, proses yang dilakukan harus dua arah yaitu:

- a. Komunikasi harus dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pemangku kepentingan atas tugas dan wewenang BPK sebagai lembaga pemeriksa;
- b. Komunikasi harus dapat menjawab kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.

Oleh karena itu, efektivitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan yang paham dengan tugas dan peran BPK ditunjukkan dari kemampuan BPK dalam mengelola kebutuhan dan harapan pemangku kepentingannya. Selain itu, untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan yang sudah diberikan, BPK akan meningkatkan kualitas dari proses pemberian Pendapat BPK sebagai wujud relevansi pemeriksaan dengan isu-isu yang berkembang dalam masyarakat yang merefleksikan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan

Berdasarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri RI, Renstra Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Renstra Kementerian Keuangan RI, dan Badan Pemeriksa Keuangan RI, maka benang merah yang dapat ditarik adalah upaya untuk mewujudkan optimalisasi pendapatan daerah dan efektifitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada

Adapun Tujuan Badan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah "*Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Tertib, Taat Aturan, Transparan dan Akuntabel*". Berdasarkan Tujuan tersebut BPKD Provinsi Sulawesi Selatan merumuskan sasaran yaitu "*Optimalisasi Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah*".

Telaahan Renstra BPKAD Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, dapat dijabarkan Arah dan Kebijakan yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone yakni sebagai berikut:

Meningkatkan pembinaan pengelolaan keuangan daerah di 24 kabupaten/kota melalui evaluasi, monitoring dan bimbingan yang berkelanjutan.

Strategi yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka meningkatkan pembinaan pengelolaan keuangan daerah di 24 kabupaten/kota melalui evaluasi, monitoring dan bimbingan yang berkelanjutan adalah:

1. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang baik di 24 kabupaten/kota se Sulawesi Selatan
2. Mendorong terwujudnya pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang baik

Berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka benang merah yang dapat ditarik adalah upaya untuk mewujudkan optimalisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah melalui evaluasi, monitoring dan bimbingan yang berkelanjutan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Dengan memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, maka ditetapkan tujuan yang bersinergi dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan, antara lain:

- Tujuan 1 : Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel Secara Berkesinambungan
- Indikator : Opini BPK-RI berdasarkan hasil audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)
- Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja dalam Pemerintahan Daerah

Sasaran 2 : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang bersih, Transparan, Efektif dan Akuntabel berbasis Teknologi Informasi

Tabel. 3.2
Matrix Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel Secara Berkesinambungan		Opini BPK-RI berdasarkan hasil audite terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)		
		Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja dalam Pemerintahan Daerah	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP		
		Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang bersih, Transparan, Efektif dan Akuntabel berbasis Teknologi Informasi	Penyusunan dan Penetapan APBD / Perubahan APBD tepat Waktu		
			Penyusunan dan Penetapan LKPD tepat waktu		
			Asset Manajemen		
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan keuangan dan Aset daerah
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan APBD dan APBDP Sesuai Ketentuan
					Persentase Penyaluran Belanja Daerah Terhadap Total APBD
					Persentase Belanja Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Total APBD
					Persentase Penyajian LK SKPD Sesuai SAP Berbasis Akrua
					Persentase SILPA Terhadap Total APBD
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah OPD Secara Benar

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinir dan difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program kerja BKAD Kabupaten Bone. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, SKPD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) (dalam hal ini BKAD) mempunyai tugas, antara lain menyusun Rancangan APBD/Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2023 supaya memerhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah dengan memerhatikan ketersediaan barang milik daerah sebagai dasar penyusunan RKPD sesuai dengan pedoman Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah. Pemerintahan provinsi /Kabupaten /Kota agar menjadikan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM) sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan skala prioritas pembangunan dan mendukung capaian kinerja Pemerintahan Daerah dengan tetap memerhatikan RPJMD.
2. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dalam upaya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur, penataan system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, peningkatan efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta memberi sanksi kepada pejabat yang melakukan tindakan melanggar ketentuan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan sendiri.

3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis AkruaI melalui penataan kelembagaan ,serta penyesuaian dan penerbitan regulasi tentang kebijakan dan system akuntansi pemerintahan daerah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintahan Daerah;
4. Pengelolaan Barang Milik Daerah ditetapkan pada upaya –upaya terwujudnya tertib administrasi barang milik daerah agar menjadi bagian dalam mewujudkan opini WTP dari BPK RI;
5. Kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) agar memerhatikan petunjuk teknis kementrian /lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut dan perlu dipertimbangkan terkait dana pendamping yang dipersyaratkan agar sudah diperhitungkan dalam pagu indikatif sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2022 tentang koordianasi penyusunan petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus;
6. Dukungan kegiatan-kegiatan dalam bentuk kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan terkait kebijakan investasi pemerintahan daerah permanen dan nonpermanen agar dapat mengurangi resiko kegagalan investasi daerah sesuai dengan Peraturan pemerintahan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintahan Daerah;
7. Mempertimbangkan terwujudnya alur informasi secara berjenjang dari kabupaten /kota ke provinsi dan kepusat atau sebaliknya terkait dengan dukungan atas terselenggaranya keterbukaan informasi publik khususnya Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD). Berdasarkan ketentuan tersebut, maka BKAD Kabupaten Bone dalam menyusun program dan kegiatan bersifat reguler, mengkoordinir dan memfasilitasi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone, utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, meliputi :

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

1. Perencanaan,Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 2. Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
 3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan
 2. Pengadaan Mebel
 3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
 4. Lainnya"

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
 4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD
 5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
 6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD

7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
 9. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
 10. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
 11. Pembinaan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
 2. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
 3. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
 5. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
 6. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
 7. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 1. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
 2. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 3. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
 4. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 5. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
 6. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 4. Penunjang Urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah
 2. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
 3. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
 4. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah
 1. Penyusunan Standar Harga
 2. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
 3. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 4. Pengamanan Barang Milik Daerah
 5. Penilaian Barang Milik Daerah
 6. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
 7. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
 8. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kebijakan umum sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2019 berisi tentang Klasifikasi,Kodefikasi , dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah berdasarkan strategi yang dipilih yang selanjutnya ditentukan program pembangunan daerah dan ditetapkan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan atas pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam rangka mencapai visi jangka menengah Kabupaten Bone. Rencana kerja dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan unit kerja. Secara keseluruhan rencana kerja dan alokasi anggaran untuk program kegiatan BKAD Kabupaten Bone pada Tahun Anggaran 2023 mengajukan usulan anggaran sebesar Rp. 514.291.057.414,- terdiri dari:

1. Belanja Operasi, sebesar Rp. 499.800.318.895,- Atau sebesar 97,18% Dari Total Rencana Anggaran Tahun 2023, dipergunakan untuk belanja gaji dan tunjangan PNS BKAD, tunjangan daerah dan iuran Askes PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.
2. Belanja Modal sebesar Rp. 718.709.880 Atau Sebesar 0,14% Dari Total Rencana Anggaran Tahun 2023,-
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 5.000.000.000,- Atau Sebesar 0,97% Dari Total Rencana Anggaran Tahun 2023
4. Belanja Transfer sebesar Rp. 8.772.028.639,- Atau Sebesar 1,71% Dari Total Rencana Anggaran Tahun 2023

Tabel.4.1
Rencana Belanja BKAD Tahun 2023

NO	URAIAN	RENCANA (Rp)	%
1	Belanja Operasi	499.800.318.895	97,18
2	Belanja Modal	718.709.880	0,14
3	Belanja Tak Terduga	5.000.000.000	0,97
4	Belanja Transfer	8.772.028.639	1,71
Jumlah		514.291.057.414	100

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKAD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	RENCANA PAGU 2024
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	02				KEUANGAN				514.291.057.414				672.766.103.881
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Rata - Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknik Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	100 Persen	31.942.115.217	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		100 Persen	85.586.101.842
5	02	01	2.01		Perencanaan,Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Realisasi Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen Setiap Tahun Anggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	100 Persen	444.820.350	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		100 Persen	518.427.629
5	02	01	2.01	01	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	2 Dokumen	155.162.650	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	236.246.445
5	02	01	2.01	02	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Dokumen	72.245.000	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	38.530.454
5	02	01	2.01	04	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Dokumen	23.349.050	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	30.933.771
5	02	01	2.01	05	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Dokumen	31.306.350	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	27.034.074
5	02	01	2.01	06	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	7 Laporan	132.560.000	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		7 Laporan	132.252.552
5	02	01	2.01	07	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	4 Laporan	30.197.300	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		4 Laporan	53.430.333

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	RENCANA PAGU 2024
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Setiap Tahun Anggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	100 Persen	6.549.360.475	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		100 Persen	53.589.734.132
5	02	01	2.02	01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tanete Riattang Barat	48 Orang / Bulan	6.549.360.475	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		48 Orang / Bulan	53.589.734.132
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Aparatur Pembina Yang Bersertifikat	Kec. Tanete Riattang Barat	100 Persen	445.767.600	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		100 Persen	568.824.761
5	02	01	2.05	02	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Tanete Riattang Barat	106 Paket	79.500.000	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		106 Paket	167.040.500
5	02	01	2.05	09	- Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Tanete Riattang Barat	3 orang	60.690.000	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		3 orang	70.400.000
5	02	01	2.05	10	- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Kec. Tanete Riattang Barat	150 Orang	90.577.600	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		150 Orang	65.184.261
5	02	01	2.05	11	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Kec. Tanete Riattang Barat	43 Orang	215.000.000	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		43 Orang	266.200.000
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Kantor Berbasis IT Setiap Tahun Anggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	100 Persen	2.048.490.650	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		100 Persen	3.521.162.284
5	02	01	2.06	02	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kec. Tanete Riattang Barat	12 Paket	352.437.050	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		12 Paket	579.845.625
5	02	01	2.06	03	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kec. Tanete Riattang Barat	12 Paket	81.740.300	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		12 Paket	166.956.274
5	02	01	2.06	04	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kec. Tanete Riattang Barat	12 Paket	400.671.900	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		12 Paket	922.901.451

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	RENCANA PAGU 2024
5	02	01	2.06	05	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kec. Tanete Riattang Barat	12 Paket	162.841.400	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		12 Paket	364.106.364
5	02	01	2.06	06	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kec. Tanete Riattang Barat	12 Dokumen	450.000.000	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		12 Dokument	399.300.000
5	02	01	2.06	09	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	12 Laporan	600.800.000	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		12 Laporan	1.088.052.570
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Realisasi Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya	Kec. Tanete Riattang Barat	100 Persen	340.759.880	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		100 Persen	374.835.868
5	02	01	2.07	01	Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan PeroranganDinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Unit	377.950.000	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		1 Unit	565.235.000-
5	02	01	2.07	05	- Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kec. Tanete Riattang Barat	19 Unit	46.322.000	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		19 Paket	20.630.500
5	02	01	2.07	06	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kec. Tanete Riattang Barat	22 Unit	294.437.880	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		22 Unit	605.478.555
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Realisasi Jasa Penyediaan dan Pelayanan Kantor Setiap Tahun Anggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	100 Persen	21.256.741.662	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		100 Persen	25.439.432.629
5	02	01	2.08	01	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Tanete Riattang Barat	12 Laporan	83.108.700	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		12 Laporan	78.571.592
5	02	01	2.08	02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kec. Tanete Riattang Barat	12 Laporan	20.452.168.962	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		12 Laporan	24.332.903.117
5	02	01	2.08	04	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Kec. Tanete Riattang Barat	12 Laporan	721.464.000	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		12 Laporan	1.027.957.920

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	RENCANA PAGU 2024
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Realisasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Sesuai Kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	100 Persen	478.224.600	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		100 Persen	526.047.060
5	02	01	2.09	01	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Tanete Riattang Barat	30 Unit	176.850.000	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		30 unit	349.714.926
5	02	01	2.09	06	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kec. Tanete Riattang Barat	180 Unit	106.900.000	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		180 Unit	247.566.000
5	02	01	2.09	09	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara atau di rehabilitasi	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Paket	194.474.600	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		1 Paket	159.895.426
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan Waktu Penetapan APBD dan APBDP Sesuai Ketentuan	Kec. Tanete Riattang Barat	Tepat Waktu	480.832.098.217	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		Tepat Waktu	585.427.747.689
						Persentase Penyaluran Belanja Daerah Terhadap Total APBD		50 Persen				50 Persen	
						Persentase Belanja Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Total APBD		22 Persen				22 Persen	
						Persentase Penyajian LK SKPD Sesuai SAP Berbasis AkruaI (%)		97 Persen				97 Persen	
						Persentase SILPA Terhadap Total APBD (%)		1 Persen				1 Persen	
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	100 Persen	2.895.103.620	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		100 Persen	3.184.613.982
5	02	02	2.01	01	- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Kec. Tanete Riattang Barat	2 Dokumen	141.414.250	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	155.555.675
5	02	02	2.01	02	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	Kec. Tanete Riattang Barat	2 Dokumen	148.719.600	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	163.591.560

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	RENCANA PAGU 2024
5	02	02	2.01	03	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA - SKPD yang Di Verifikasi	Kec. Tanete Riattang Barat	2 Dokumen	174.940.680	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	192.434.748
5	02	02	2.01	04	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Perubahan RKA - SKPD yang di Verifikasi	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Dokumen	184.280.980	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	202.709.078
5	02	02	2.01	05	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA - SKPD Yang Diverifikasi	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Dokumen	99.111.360	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	93.108.796
5	02	02	2.01	06	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Perubahan DPA - SKPD Yang Di Verifikasi	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Dokumen	85.173.200	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	93.690.520
5	02	02	2.01	07	- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Kec. Tanete Riattang Barat	2 Dokumen	1.039.986.800	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	1.143.985.480
5	02	02	2.01	08	- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kec. Tanete Riattang Barat	2 Dokumen	281.459.300	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	309.605.230
5	02	02	2.01	09	- Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	2 Dokumen	399.297.100	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	439.226.810
5	02	02	2.01	11	- Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	2 Dokumen	200.353.800	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	220.389.180
5	02	02	2.01	13	- Pembinaan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	132 Orang	140.366.550	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		132 Orang	170.316.905
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penatausahaan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	100 Persen	1.707.067.550	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		100 Persen	1.980.447.312
5	02	02	2.02	01	- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	7500 SP2D	367.951.800	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		7500 SP2D	333.246.980

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	RENCANA PAGU 2024
5	02	02	2.02	03	-	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kec. Tanete Riattang Barat	7261 SPM	256.800.700	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	7261 SPM	353.980.770
5	02	02	2.02	05	-	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kec. Tanete Riattang Barat	12 Dokumen	160.152.500	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	176.167.750
5	02	02	2.02	07	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan atau Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan atau Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kec. Tanete Riattang Barat	12 Laporan	247.725.000	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	12 Laporan	272.497.500
5	02	02	2.02	09	-	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kec. Tanete Riattang Barat	12 Dokumen	152.559.750	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	12 Laporan	167.815.725
5	02	02	2.02	10	-	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggung Jawabab Sub Kegiatan	Kec. Tanete Riattang Barat	2 Dokumen	192.644.000	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	211.908.400
5	02	02	2.02	11	-	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	132 Orang	329.233.800	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	132 Orang	464.830.187
5	02	02	2.03			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Kec. Tanete Riattang Barat	100 Persen	1.331.994.410	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	100 Persen	1.465.193.184
5	02	02	2.03	01	-	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	4 Laporan	258.482.460	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	4 Laporan	286.248.765
5	02	02	2.03	04	-	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Terkonsolidasi	Kec. Tanete Riattang Barat	4 Laporan	196.539.320	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	4 Laporan	210.968.135
5	02	02	2.03	05	-	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	4 Dokumen	508.510.580	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	562.013.551

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	RENCANA PAGU 2024
5	02	02	2.03	08	- Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kec. Tanete Riattang Barat	4 Dokumen	145.033.810	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	155.350.943
5	02	02	2.03	09	- Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	4 Dokumen	71.013.340	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	77.587.125
5	02	02	2.03	11	- Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Yang Mengikut Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	132 orang	152.414.900	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		132 orang	173.024.665
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Perencanaan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	100 Persen	475.050.347.537	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		100 Persen	578.798.074.935
5	02	02	2.04	04	- Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Laporan	18.494.326.702	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		1 Laporan	9.649.231.502
5	02	02	2.04	08	- Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kec. Tanete Riattang Barat	2 Laporan	442.783.992.196	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		2 Laporan	504.428.155.261
5	02	02	2.04	09	- Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kec. Tanete Riattang Barat	2 Laporan	5.000.000.000	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		2 Laporan	54.450.000.000
5	02	02	2.04	10	- Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	2 Laporan	8.772.028.639	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		2 Laporan	10.270.688.172
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah OPD Secara Benar (%)	Kec. Tanete Riattang Barat	100 Persen	1.364.429.080	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		100 Persen	1752.254.350
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	100 Persen	1.364.429.080	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		100 Persen	1.752.254.350
5	02	03	2.01	01	- Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga Yang Disusun	Kec. Tanete Riattang Barat	4 Dokumen	270.959.700	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	248.690.895

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	RENCANA PAGU 2024
5	02	03	2.01	03	- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	2 Dokumen	77.371.860	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	128.926.463
5	02	03	2.01	04	- Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	4 Dokumen	147.780.590	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	209.246.843
5	02	03	2.01	07	- Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	6 Laporan	293.085.570	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		6 Laporan	290.273.530
5	02	03	2.01	08	- Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	2 Laporan	166.806.840	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		2 Laporan	231.992.235
5	02	03	2.01	10	- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	2 Dokumen	111.502.540	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	150.546.481
5	02	03	2.01	11	- Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	2 Laporan	187.385.300	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		2 Laporan	266.212.431
5	02	03	2.01	13	- Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	132 orang	109.536.680	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		132 Orang	226.365.499

BAB V

PENUTUP

A. Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Perangkat daerah Badan keuangan dan Aset daerah Kabupaten bone merupakan bagian integritas dalam proses pengelolaan keuangan Daerah dalam perencanaan strategis pemerintahan, guna terlaksananya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasilguna , bersih , dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi , kolusi, dan nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggungjawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program kegiatan dan sub. Kegiatan tersebut masih mengalami hambatan Karena adanya Pandemi Covid – 19 . Adapun ketersediaan Anggaran yang tidak sesuai kebutuhan akan diusulkan melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya.

B. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub. Kegiatan berdasarkan rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Keuanganga dan Aset daerah Kabupaten Bone dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD yang telah disahkan .

C. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut program kegiatan dan sub. kegiatan Perangkat daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone pada tahun 2023 menetapkan 3 Program, 12 Kegiatan dan 62 Sub. Kegiatan

Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone tahun 2023 merupakan menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah tahun ketiga RPJMD dan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone tahun 2018-2023 ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan.

Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur, yang selanjutnya akan dikompilasikan di tingkat Pemerintah Daerah menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Bone

Dengan penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan semua pihak memiliki satu persepsi tentang Rencana Kerja sehingga pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dapat mencapai hasil yang optimal.

Watampone, 25 Juli 2022
KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KAB. BONE



H. NAJAMUDDIN, S.Sos, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19631007 198611 1 002

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	02				KEUANGAN													
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Realisasi Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen Setiap Tahun Anggaran	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	2 Dokumen	16 Dokumen	155,162,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah	100 Persen	236,246,445
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan Realisasi Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen Setiap Tahun Anggaran	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	1 Dokumen	16 Dokumen	72,245,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah	100 Persen	38,530,454
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Cakupan Realisasi Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen Setiap Tahun Anggaran	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	1 Dokumen	16 Dokumen	23,349,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah	100 Persen	30,933,771
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Cakupan Realisasi Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen Setiap Tahun Anggaran	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	1 Dokumen	16 Dokumen	31,306,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah	100 Persen	27,034,074
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Realisasi Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen Setiap Tahun Anggaran	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	7 Laporan	16 Dokumen	132,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah	100 Persen	132,252,552
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Realisasi Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen Setiap Tahun Anggaran	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	4 Laporan	16 Dokumen	30,197,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah	100 Persen	53,430,333
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Setiap Tahun Anggaran	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	48 Orang/ Bulan	48 Orang/ Bulan	6,549,360,475	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah	100 Persen	53,589,734,132
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
5	02	01	2.05												445,767,600			568,824,761

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Ketersediaan Aparatur Pembina Yang Bersertifikat	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	106 Paket	122 Laporan	79,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah	100 Persen	167,040,500
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Ketersediaan Aparatur Pembina Yang Bersertifikat	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	3 Orang	122 Laporan	60,690,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah	100 Persen	70,400,000
5	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Ketersediaan Aparatur Pembina Yang Bersertifikat	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	150 Orang	122 Laporan	90,577,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah	100 Persen	65,184,261
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Ketersediaan Aparatur Pembina Yang Bersertifikat	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	43 Orang	122 Laporan	215,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah	100 Persen	266,200,000
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								2,048,490,650					3,521,162,284
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan Ketersediaan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Kantor Berbasis IT Setiap Tahun Anggaran	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Paket	59941 Laporan	352,437,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah	100 Persen	579,845,625
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan Ketersediaan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Kantor Berbasis IT Setiap Tahun Anggaran	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Paket	59941 Laporan	81,740,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah	100 Persen	166,956,274
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan Ketersediaan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Kantor Berbasis IT Setiap Tahun Anggaran	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Paket	59941 Laporan	400,671,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah	100 Persen	922,901,451
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan Ketersediaan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Kantor Berbasis IT Setiap Tahun Anggaran	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Paket	59941 Laporan	162,841,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah	100 Persen	364,106,364

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Cakupan Ketersediaan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Kantor Berbasis IT Setiap Tahun Anggaran	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Dokumen	59941 Laporan	450,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah	100 Persen	399,300,000	
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Ketersediaan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Kantor Berbasis IT Setiap Tahun Anggaran	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Laporan	59941 Laporan	600,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah	100 Persen	1,088,052,570	
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								718,709,880				1,191,344,055		
5	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Cakupan Realisasi Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	1 Unit	47 Unit	377,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah	100 Persen	565,235,000	
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Cakupan Realisasi Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	19 Unit	47 Unit	46,322,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah	100 Persen	20,630,500	
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Cakupan Realisasi Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	22 Unit	47 Unit	294,437,880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah	100 Persen	605,478,555	
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								21,256,741,662				25,439,432,629		
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Realisasi Jasa Penyediaan dan Pelayanan Kantor Setiap Tahun Anggaran	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Laporan	3623 Laporan	83,108,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah	100 Persen	78,571,592	
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan Realisasi Jasa Penyediaan dan Pelayanan Kantor Setiap Tahun Anggaran	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Laporan	3623 Laporan	20,452,168,962	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah	100 Persen	24,332,903,117	
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan Realisasi Jasa Penyediaan dan Pelayanan Kantor Setiap Tahun Anggaran	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Laporan	3623 Laporan	721,464,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah	100 Persen	1,027,957,920	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								478,224,600				757,176,352
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Cakupan Realisasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Sesuai Kebutuhan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	30 Unit	228 Laporan	176,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah	100 Persen	349,714,926
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Cakupan Realisasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Sesuai Kebutuhan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	180 Unit	228 Laporan	106,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah	100 Persen	247,566,000
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Cakupan Realisasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Sesuai Kebutuhan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	1 Unit	228 Laporan	194,474,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah	100 Persen	159,895,426
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								480,984,513,117				585,427,747,689
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah								2,895,103,620				3,184,032,258
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Ketepatan Waktu Penetapan APBD dan APBDP sesuai Ketentuan Persentase Belanja Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Total APBD Persentase Penyaluran Belanja Daerah terhadap total APBD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Tepat Waktu . 22 Persen 50.00 Persen	2 Dokumen	18 Dokumen	141,414,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Ketepatan Waktu Penetapan APBD dan APBDP sesuai Ketentuan Persentase Belanja Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Total APBD Persentase Penyaluran Belanja Daerah terhadap total APBD	Tepat Waktu . 22 Persen 50.00 Persen	155,555,675
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Ketepatan Waktu Penetapan APBD dan APBDP sesuai Ketentuan Persentase Belanja Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Total APBD Persentase Penyaluran Belanja Daerah terhadap total APBD	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Tepat Waktu . 22 Persen 50.00 Persen	2 Dokumen	18 Dokumen	148,719,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Ketepatan Waktu Penetapan APBD dan APBDP sesuai Ketentuan Persentase Belanja Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Total APBD Persentase Penyaluran Belanja Daerah terhadap total APBD	Tepat Waktu . 22 Persen 50.00 Persen	163,591,560

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	02	2.01	03		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Ketepatan Waktu Penetapan APBD dan APBDP sesuai Ketentuan Persentase Belanja Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Total APBD Persentase Penyaluran Belanja Daerah terhadap total APBD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Tepat Waktu . 22 Persen 50.00 Persen	2 Dokumen	18 Dokumen	174,940,680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ketepatan Waktu Penetapan APBD dan APBDP sesuai Ketentuan Persentase Belanja Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Total APBD Persentase Penyaluran Belanja Daerah terhadap total APBD	Tepat Waktu . 22 Persen 50.00 Persen	192,434,748
5	02	02	2.01	04		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Ketepatan Waktu Penetapan APBD dan APBDP sesuai Ketentuan Persentase Belanja Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Total APBD Persentase Penyaluran Belanja Daerah terhadap total APBD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Tepat Waktu . 22 Persen 50.00 Persen	2 Dokumen	18 Dokumen	184,280,980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ketepatan Waktu Penetapan APBD dan APBDP sesuai Ketentuan Persentase Belanja Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Total APBD Persentase Penyaluran Belanja Daerah terhadap total APBD	Tepat Waktu . 22 Persen 50.00 Persen	202,709,078
5	02	02	2.01	05		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Ketepatan Waktu Penetapan APBD dan APBDP sesuai Ketentuan Persentase Belanja Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Total APBD Persentase Penyaluran Belanja Daerah terhadap total APBD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Tepat Waktu . 22 Persen 50.00 Persen	1 Dokumen	18 Dokumen	99,111,360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ketepatan Waktu Penetapan APBD dan APBDP sesuai Ketentuan Persentase Belanja Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Total APBD Persentase Penyaluran Belanja Daerah terhadap total APBD	Tepat Waktu . 22 Persen 50.00 Persen	93,108,796
5	02	02	2.01	06		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Ketepatan Waktu Penetapan APBD dan APBDP sesuai Ketentuan Persentase Belanja Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Total APBD Persentase Penyaluran Belanja Daerah terhadap total APBD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Tepat Waktu . 22 Persen 50.00 Persen	1 Dokumen	18 Dokumen	85,173,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ketepatan Waktu Penetapan APBD dan APBDP sesuai Ketentuan Persentase Belanja Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Total APBD Persentase Penyaluran Belanja Daerah terhadap total APBD	Tepat Waktu . 22 Persen 50.00 Persen	93,108,796

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Ketepatan Waktu Penetapan APBD dan APBDP sesuai Ketentuan Persentase Belanja Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Total APBD Persentase Penyaluran Belanja Daerah terhadap total APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Tepat Waktu . 22 Persen 50,00 Persen	2 Dokumen	18 Dokumen	1,039,986,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Ketepatan Waktu Penetapan APBD dan APBDP sesuai Ketentuan Persentase Belanja Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Total APBD Persentase Penyaluran Belanja Daerah terhadap total APBD	Tepat Waktu . 22 Persen 50,00 Persen	1,143,985,480
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Ketepatan Waktu Penetapan APBD dan APBDP sesuai Ketentuan Persentase Belanja Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Total APBD Persentase Penyaluran Belanja Daerah terhadap total APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Tepat Waktu . 22 Persen 50,00 Persen	2 Dokumen	18 Dokumen	281,459,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Ketepatan Waktu Penetapan APBD dan APBDP sesuai Ketentuan Persentase Belanja Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Total APBD Persentase Penyaluran Belanja Daerah terhadap total APBD	Tepat Waktu . 22 Persen 50,00 Persen	309,605,230
5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Ketepatan Waktu Penetapan APBD dan APBDP sesuai Ketentuan Persentase Belanja Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Total APBD Persentase Penyaluran Belanja Daerah terhadap total APBD	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Tepat Waktu . 22 Persen 50,00 Persen	2 Dokumen	18 Dokumen	399,297,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Ketepatan Waktu Penetapan APBD dan APBDP sesuai Ketentuan Persentase Belanja Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Total APBD Persentase Penyaluran Belanja Daerah terhadap total APBD	Tepat Waktu . 22 Persen 50,00 Persen	439,226,810
5 02 02 2.01 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan APBD dan APBDP sesuai Ketentuan Persentase Belanja Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Total APBD Persentase Penyaluran Belanja Daerah terhadap total APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Tepat Waktu . 22 Persen 50,00 Persen	2 Dokumen	18 Dokumen	200,353,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Ketepatan Waktu Penetapan APBD dan APBDP sesuai Ketentuan Persentase Belanja Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Total APBD Persentase Penyaluran Belanja Daerah terhadap total APBD	Tepat Waktu . 22 Persen 50,00 Persen	220,389,180

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
5 02 02 2.01 13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Ketepatan Waktu Penetapan APBD dan APBDP sesuai Ketentuan Persentase Belanja Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Total APBD Persentase Penyaluran Belanja Daerah terhadap total APBD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Tepat Waktu . 22 Persen 50.00 Persen	132 Orang	18 Dokumen	140,366,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Ketepatan Waktu Penetapan APBD dan APBDP sesuai Ketentuan Persentase Belanja Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Total APBD Persentase Penyaluran Belanja Daerah terhadap total APBD	Tepat Waktu . 22 Persen 50.00 Persen	170,316,905
5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah									1,707,067,550			1,980,447,312
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase silpa Terhadap total APBD (%)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Penatausahaan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	2 Persen	7500 Dokumen	14811 Laporan	367,951,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase silpa Terhadap total APBD (%)	2 Persen	333,246,980
5 02 02 2.02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase silpa Terhadap total APBD (%)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase Penatausahaan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	2 Persen	7261 Dokumen	14811 Laporan	256,800,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase silpa Terhadap total APBD (%)	2 Persen	353.980.770
5 02 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase silpa Terhadap total APBD (%)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase Penatausahaan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	2 Persen	12 Dokumen	14811 Laporan	160,152,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase silpa Terhadap total APBD (%)	2 Persen	176,167,750
5 02 02 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Persentase silpa Terhadap total APBD (%)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Persentase Penatausahaan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	2 Persen	12 Laporan	14811 Laporan	247,725,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase silpa Terhadap total APBD (%)	2 Persen	272.497.500

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase silpa Terhadap total APBD (%)	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase Penatausahaan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	2 Persen	12 Dokumen	14811 Laporan	152,559,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase silpa Terhadap total APBD (%)	2 Persen	167,815,725
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Persentase silpa Terhadap total APBD (%)	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Persentase Penatausahaan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	2 Persen	2 Dokumen	14811 Laporan	192,644,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase silpa Terhadap total APBD (%)	2 Persen	211,908,400
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase silpa Terhadap total APBD (%)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Penatausahaan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	2 Persen	132 Orang	14811 Laporan	329,233,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase silpa Terhadap total APBD (%)	2 Persen	464,830,187
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah								1,331,994,410					1,465,193,184
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Persentase Penyajian LK SKPD Sesuai SAP Berbasis Aktual Persentase Penyajian LK SKPD Sesuai SAPBerbasis Aktual	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen 97.49 Persen	4 Laporan	24 Laporan	258,482,460	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyajian LK SKPD Sesuai SAP Berbasis Aktual Persentase Penyajian LK SKPD Sesuai SAPBerbasis Aktual	100 Persen 97.49 Persen	286,248,765
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Penyajian LK SKPD Sesuai SAP Berbasis Aktual Persentase Penyajian LK SKPD Sesuai SAPBerbasis Aktual	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen 97.49 Persen	4 Laporan	24 Laporan	196,539,320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyajian LK SKPD Sesuai SAP Berbasis Aktual Persentase Penyajian LK SKPD Sesuai SAPBerbasis Aktual	100 Persen 97.49 Persen	210,968,135
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase Penyajian LK SKPD Sesuai SAP Berbasis Aktual Persentase Penyajian LK SKPD Sesuai SAPBerbasis Aktual	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen 97.49 Persen	4 Dokumen	24 Laporan	508,510,580	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyajian LK SKPD Sesuai SAP Berbasis Aktual Persentase Penyajian LK SKPD Sesuai SAPBerbasis Aktual	100 Persen 97.49 Persen	562,013,551

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur			Target	
5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase Penyajian LK SKPD Sesuai SAP Berbasis Aktual Persentase Penyajian LK SKPD Sesuai SAPBerbasis Aktual	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen 97.49 Persen	4 Dokumen	24 Laporan	145,033,810	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyajian LK SKPD Sesuai SAP Berbasis Aktual Persentase Penyajian LK SKPD Sesuai SAPBerbasis Aktual	100 Persen 97.49 Persen	155,350,943	
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase Penyajian LK SKPD Sesuai SAP Berbasis Aktual Persentase Penyajian LK SKPD Sesuai SAPBerbasis Aktual	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen 97.49 Persen	4 Dokumen	24 Laporan	71,013,340	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyajian LK SKPD Sesuai SAP Berbasis Aktual Persentase Penyajian LK SKPD Sesuai SAPBerbasis Aktual	100 Persen 97.49 Persen	77,587,125	
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Penyajian LK SKPD Sesuai SAP Berbasis Aktual Persentase Penyajian LK SKPD Sesuai SAPBerbasis Aktual	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen 97.49 Persen	132 Orang	24 Laporan	152,414,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyajian LK SKPD Sesuai SAP Berbasis Aktual Persentase Penyajian LK SKPD Sesuai SAPBerbasis Aktual	100 Persen 97.49 Persen	173,024,665	
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah								475,050,347,537				578,798,074,935		
5	02	02	2.04	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase Penyaluran Belanja Daerah terhadap total APBD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase Perencanaan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten Kota	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	22 Persen	1 Laporan	7 Dokumen	18,494,326,702	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyaluran Belanja Daerah terhadap total APBD	22 Persen	9,649,231,502	
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase Penyaluran Belanja Daerah terhadap total APBD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase Perencanaan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten Kota	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	22 Persen	2 Laporan	7 Dokumen	442,783,992,196	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyaluran Belanja Daerah terhadap total APBD	22 Persen	504,428,155,261	
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Penyaluran Belanja Daerah terhadap total APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Perencanaan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten Kota	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	22 Persen	2 Laporan	7 Dokumen	5,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyaluran Belanja Daerah terhadap total APBD	22 Persen	54,450,000,000	
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase Penyaluran Belanja Daerah terhadap total APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten Kota	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	22 Persen	2 Laporan	7 Dokumen	8,772,028,639	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyaluran Belanja Daerah terhadap total APBD	22 Persen	10,270,688,172	
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								1,364,429,080				1,752,254,350		
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah								1,364,429,080				1,752,254,350		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah OPD Secara Benar	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Persentase Pengelolaan Barang Milika Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	4 Dokumen	32 laporan	270,959,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah OPD Secara Benar	100 Persen	248,690,895
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah OPD Secara Benar	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milika Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	2 Dokumen	32 laporan	77,371,860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah OPD Secara Benar	100 Persen	128,926,436
5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah OPD Secara Benar	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milika Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	4 Dokumen	32 laporan	147,780,590	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah OPD Secara Benar	100 Persen	209,246,843
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah OPD Secara Benar	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milika Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	6 Laporan	32 laporan	293,085,570	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah OPD Secara Benar	100 Persen	290,273,530
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah OPD Secara Benar	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milika Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	2 Laporan	32 laporan	166,806,840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah OPD Secara Benar	100 Persen	231,992,235
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah OPD Secara Benar	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milika Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	10 Dokumen	32 laporan	111,502,540	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah OPD Secara Benar	100 Persen	150,546,481
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah OPD Secara Benar	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milika Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	2 Laporan	32 laporan	187,385,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah OPD Secara Benar	100 Persen	266,212,431
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah OPD Secara Benar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Barang Milika Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	2 Laporan	32 laporan	109,536,680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah OPD Secara Benar	100 Persen	226,365,499
TOTAL													514,291,057,414					672,766,103,881